

LAPORAN PENELITIAN

ANALISIS POTENSI DAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SISTEM INOVASI DAERAH YANG BERDAYA SAING



Drs. Amirul Mustofa, M.Si

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS DR. SOETOMO
Juli 2014**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Analisis Potensi dan Pembentukan Kelembagaan Sistem Inovasi Daerah Yang Berdaya Saing

Ketua Tim Peneliti :

a. Nama Lengkap : Drs. Amirul Mustofa, M.Si
b. NIDN : 0718016601
c. Jabatan Fungsional : Lektor/III/C
d. Program Studi : Administrasi Publik
e. Nomor HP : 081230594747
f. Alamat Surel (e-mail) : amirulmust66@gmail.com

Anggota Peneliti (1) :

a. Nama Lengkap :
b. NIDN :
c. Perguruan Tinggi :

Lama Penelitian Keseluruhan : 4 Bulan
Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp. 10.000.000,00
Biaya Mandiri : Rp. 5.000.000,00
Biaya yang Diusulkan : Rp. 5.000.000,00
Biaya Tahun Berjalan : - Diusulkan ke Instansi Rp. 0,00
- Dana internal PT Rp. 5.000.000,00
- Dana institusi lain Rp. 0,00
- *Inkind* sebutkan -

Mengetahui
Dekan Fakultas

(Drs. Basuki Nugroho, M.Si)
NIP. 195709021986031001



Surabaya, 30 Juli 2014

Ketua Peneliti

(Dr. Drs. Amirul Mustofa, M.Si)
NPP. 91.01.1.085

Mengetahui
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Dr. Soetomo



Dr. Sri Utami Ady, SE, MM
NPP. 4.1.01.170

KATA PENGANTAR

Salah satu tugas Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Daya saing daerah perlu dikembangkan melalui potensi daerah yang dimiliki dan didesain dengan menggunakan ilmu dan teknologi, sehingga melahirkan produk-produk yang inovatif dan memiliki kemampuan bersaing di pasar lokal, regional maupun nasional.

Penelitian tentang Analisis Potensi dan Kelembagaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang Berdaya Saing di Kabupaten Pasuruan diharapkan dapat menentukan potensi dan pengelolaannya, sehingga potensi daerah yang unggul tersebut bisa dikembangkan, dan memiliki daya saing, dan dikelola oleh lembaga berbasis ilmu dan teknologi. Keseluruhan materi tersebut menjadi satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Dengan demikian hasil analisis ini menjadi dokumen yang terkait dengan dokumen perencanaan di Kabupaten Pasuruan lainnya yang juga tidak terpisahkan dengan SIDa Provinsi Jawa Timur dan Sistem Inovasi Nasional (SINAS). Hasil penelitian ini selanjutnya menjadi informasi bagi Tim SIDa yang bertugas untuk menyusun dan mengimplementasikan SIDa. Terima kasih

Surabaya, Juli 2014

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i	
PENGANTAR	ii	
DAFTAR ISI	iii	
DAFTAR TABEL	v	
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	vi	
ABSTRAK	vii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar belakang	1
	1.2. Tujuan	4
	1.3. Keluaran (Output)	5
	1.4. Manfaat	5
	1.5. Sasaran	6
BAB II	KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENDEKATAN	6
	2.1. Kerangka Pemikiran	6
	2.1.1. Inovasi Daerah	6
	2.1.2. Daya Saing dan Kohesi Sosial Daerah	9
	2.1.3. Sistem Inovasi Daerah	9
	2.1.4. Roadmap Penguatan SIDA	16
	2.1.5. Kebijakan Penguatan SIDA	20
	2.2. Metode Pendekatan	23
	2.2.1. Jenis Penelitian	23
	2.2.2. Alur Penelitian Penguatan SIDA	23
	2.2.3. Jenis dan Sumber Data	24
	2.2.4. Subyek Penelitian	25
	2.2.5. Metode Pengumpulan Data	26
	2.2.6. Metode Analisis dan Interpretasi Hasil Analisis Data	26
BAB III	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	28
	3.1. Kondisi Geografis dan Topografis, Strategis, Hidografis dan Infrastruktur	28
	3.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan	35
	3.2.1. Pertumbuhan PDRB	35
	3.2.2. PDRB Per-Sektor	36
	3.2.3. Pendapatan per Kapita	40
	3.3. Penduduk Kabupaten Pasuruan	41

	3.4. Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan	43
	3.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).	46
BAB IV	ANALISIS POTENSI DAERAH YANG MENDUKUNG SISTEM INOVASI DAERAH DAN MEMILIKI DAYA SAING	49
	4.1. Sektor Kebudayaan dan Pariwisata	50
	4.2. Sektor Industri	51
	4.3. Sektor Pertanian Tanaman Pangan	53
	4.4. Sektor Produksi Tanaman Perkebunan	59
	4.5. Sektor Kelautan dan Perikanan	63
	4.6. Sektor Peternakan dan Kehewanan	66
BAB V	ANALISIS KEBIJAKAN YANG MENJADI DASAR SISTEM INOVASI DAERAH	71
	5.1. Daya Saing dan Sistem Inovasi dalam Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2014	71
	5.2. Daya Saing dan Sistem Inovasi Daerah dalam Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Timur 2014	74
	5.3. Daya Saing dan Sistem Inovasi Daerah dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 - 2025	77
	5.4. Daya Saing dan Sistem Inovasi Daerah dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018	80
BAB VI	PERUMUSAN DAN PENETAPAN SISTEM INOVASI DAERAH	94
BAB VII	TANTANGAN DAN PELUANG SISTEM INOVASI DAERAH	97
	7.1. Tanaman Mangga	97
	7.2. Tanaman Kopi	99
	7.3. Ikan Lele	101
	7.4. Ikan Bandeng	103
BAB VIII	KELEMBAGAAN SISTEM INOVASI DAERAH	106
BAB IX	PENUTUP	110
	9.1. Kesimpulan	110
	9.2. Rekomendasi	113
	DAFTAR PUSTAKA	114

DAFTAR TABEL

Tabel

2.1	Jumlah Sampel Menurut Posisinya Dalam Lembaga SIDA	25
3.1	Pertumbuhan Sektoral PDRB ADHK Tahun 2000 (dalam %)	37
3.2	Volume PDRB Kabupaten Pasuruan Tahun 2010-2013 Atas Dasar Harga Berlaku (dalam jutaan rupiah)	38
3.3	Kontribusi Sektoral PDRB ADHB Tahun 2010-2013 (dalam %)	39
3.4	Struktur Penduduk Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	42
3.5	Komposisi Penduduk Kabupaten Pasuruan Menurut Mata Pencaharian/Lapangan Usaha Sektoral	43
3.6	Perkembangan Angkatan Kerja Yang Bekerja tahun 2009-2012	44
3.7	Angkatan Kerja Dan Tingkat Pengangguran	46
3.8	Perkembangan IPM Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2012	47
4.1	Perkembangan IKMB Kabupaten Pasuruan Tahun 2012-2013	53
4.2	Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2012 -2013	54
4.3	Produksi Tanaman Perkebunan	60

DAFTAR BAGAN/GAMBAR

Gambar	2.1 Beragam Inovasi, Kesalingterkaitan & Efek Riak Penguatan	10
	2.2 Skematik Generik Sistem Inovasi	13
	3.1 Peta Administrasi Kabupaten Pasuruan	29
	3.2 Luas Wilayah Kabupaten Pasuruan per Kecamatan	32
	3.3 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pasuruan	35
	3.4 Pendapatan Per Kapita Kab. Pasuruan Tahun 2010-2013	41
	3.5 Perkembangan Angkatan Kerja yang Bekerja	45
	3.6 Perkembangan IPM dan Indikator Pendukungnya Kabupaten Pasuruan Tahun 2012-2013	47
	3.7 Perbandingan IPM Kabupaten Pasuruan dengan Jawa Timur	48
	5.1 Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP 2014 sesuai dengan RPJM Nasional	72

ABSTRAK

Salah satu aspek utama dalam pembangunan di Pemerintah Kabupaten/Kota adalah bagaimana pemerintah tersebut mampu memahami dan mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, sehingga terbentuk dalam sistem inovasi daerah (SIDa) yang memberikan kontribusi pada pembangunan dan berdaya saing. Sehubungan dengan itu, diperlukan adanya penelitian yang bertujuan untuk: (i) mendeskripsikan dan mengidentifikasi potensi daerah-SIDa yang memiliki daya saing; (ii) mendeskripsikan tantangan dan peluang potensi daerah - SIDa yang memiliki daya saing; (iii) mendeskripsikan potensi daerah-SIDa yang memiliki daya saing yang ingin dicapai; (iv) merumuskan arah kebijakan dan strategi penguatan SIDa. Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan luaran dalam bentuk dokumen penting dalam penyusunan *Roadmap* penguatan SIDa. Dengan demikian, manfaat dari penelitian ini adalah bahwa akan terurai berbagai hal seperti: (i) potensi daerah - SIDa yang memiliki daya saing; (ii) tantangan dan peluang potensi daerah - SIDa yang memiliki daya saing; (iii) potensi daerah - SIDa yang memiliki daya saing yang ingin dicapai; (iv) rumusan arah kebijakan dan strategi penguatan SIDa.

Kata kunci: sistem inovasi daerah, daya saing, pembangunan daerah

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya untuk meningkatkan perkembangan perekonomian Nasional, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah di Indonesia, maka seluruh jenjang pemerintah harus merespon perkembangan perekonomian global. Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian dalam perkembangan perekonomian saat ini “aspek pengetahuan dan inovasi” yang lebih dikenal dengan pembangunan berbasis “ekonomi pengetahuan”. Karena itu pembangunan disetiap level pemerintahan diupayakan agar mampu berdaya saing, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional melalui dukungan potensi lokal. Sementara bahwa “daya saing global semakin ditentukan oleh faktor-faktor lokalitas dan upaya peningkatannya perlu diiringi dengan penguatan kohesi sosial masyarakat yang maju” [Taufik (2005:5)].

Pengembangan Sistem Inovasi Nasional merupakan agenda Nasional sesuai dengan UU no 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan UU nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Penguatan Sistem Inovasi Nasional merupakan wahana utama peningkatan daya saing dan kohesi sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, maju, mandiri, dan beradab.

Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi proses integrasi antara komponen penguatannya. SIDa

pada dasarnya juga mengakomodasi materi yang termuat dalam RPJMN 2010-2014, melalui pendekatan pembangunan berdimensi kewilayahan untuk mengakomodasikan dinamika dan kapasitas daerah dalam perencanaan pembangunan nasional. Implementasi dari SIDA memuat tiga tindakan utama yaitu penataan pilar SIDA, pengembangan fokus prioritas, dan implementasi kerangka kerja sistem inovasi. SIDA dapat dikembangkan dengan pengembangan dan sinkronisasi instrumen kebijakan yang berkaitan dengan SIDA secara baik dan menyeluruh. Instrumen kebijakan tersebut meliputi pemangku kepentingan, kondisi infrastruktur, dan dukungan kebijakan.

Kemampuan Daerah dapat berupa kemampuan untuk menciptakan, mengembangkan, dan menawarkan tiga aspek, yakni: i) iklim/lingkungan yang paling prospektif bagi bisnis dan inovasi produk; ii) peluang dan daya tarik investasi, iii) potensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan sumber daya lainnya; iii) potensi berkinerja unggul secara berkelanjutan. Terkait dengan potensi tersebut Pemerintah Daerah wajib berupaya untuk menjadikan daerahnya sebagai daerah yang punya daya saing sesuai dengan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004.

Secara konseptual dapat disarikan bahwa proses untuk mewujudkan daya saing daerah secara berkelanjutan perlu adanya strategi inovasi daerah, dengan tiga dukungan, yakni: i) rumusan kebijakan dan program pengembangan suatu produk yang dijadikan objek untuk bersaing; ii) interaksi stakeholder yang terkait dalam sebuah kelembagaan yang berkepentingan terhadap objek yang dikembangkan; dan iii) daya saing yang dikembangkan adalah daya saing yang memberikan manfaat yang paling besar kepada

stakeholder. Implikasi strategisnya, proses untuk mewujudkan daya saing daerah secara berkelanjutan perlu dirumuskan dalam Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang memuat aspek penting dan terkait dengan RPJMD, RKPD, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Daerah (MP3ED), dan Renstra SKPD.

Landasan hukum dirumuskannya SIDa adalah Peraturan bersama Menristek dan Mendagri Nomor: 03 Tahun 2012, Nomor: 36 Tahun 2012, tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Dalam peraturan tersebut, menyiratkan bahwa untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, daya saing daerah, dan pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan MP3ED, perlu melakukan penguatan SIDa.

Kisi-kisi penting dalam penguatan SIDa adalah: i) merumuskan, menetapkan, dan memberlakukan kebijakan penguatan SIDa, ii) Penataan unsur SIDa, dan iii) Pengembangan SIDa. Pada pasal 2 Peraturan bersama Menristek dan Mendagri Nomor: 03 Tahun 2012, Nomor: 36 Tahun 2012, maka dalam rangka penguatan SIDa, masing-masing pemerintah perlu mengawalinya dengan membentuk Tim Koordinasi SIDa, yang disertai tugas untuk: i) menyusun Roadmap penguatan SIDa; ii) mengintegrasikan program SIDa dalam dokumen rencana strategis daerah; iii) melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergi SIDa; iv) melakukan penataan unsur SIDa; v) melakukan pengembangan SIDa; vi) mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDa; vii). mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDa; viii) melakukan monitoring dan evaluasi; dan ix) melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDa (pasal 30 Peraturan bersama Menristek dan Mendagri Nomor: 03 Tahun 2012, Nomor: 36 Tahun 2012).

Sejalan dengan uraian di atas, dipandang perlu adanya

Penelitian yang hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan dalam perumusan dan penetapan kebijakan penguatan SIDA di Kabupaten Pasuruan.

1.2. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan mengidentifikasi potensi daerah-SIDA yang memiliki daya saing di Kabupaten Pasuruan;
2. Mendeskripsikan tantangan dan peluang potensi daerah - SIDA yang memiliki daya saing di Kabupaten Pasuruan;
3. Mendeskripsikan potensi daerah-SIDA yang memiliki daya saing yang ingin dicapai oleh Kabupaten Pasuruan;
4. Merumuskan arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA di Kabupaten Pasuruan;

1.3. Keluaran (Output)

Keluaran dari penelitian SIDA Kabupaten Pasuruan adalah tersusunnya dokumen hasil penelitian SIDA Kabupaten Pasuruan yang dalam hal ini difokuskan pada penyusunan *Roadmap* penguatan SIDA di Kabupaten Pasuruan.

1.4. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah tersusunnya dokumen penelitian yang dalam hal ini difokuskan pada penyusunan *Roadmap* penguatan SIDA di Kabupaten Pasuruan, yang didalamnya memuat informasi tentang:

1. Potensi daerah - SIDA yang memiliki daya saing di Kabupaten Pasuruan;

2. Tantangan dan peluang potensi daerah - SIDA yang memiliki daya saing di Kabupaten Pasuruan;
3. Potensi daerah - SIDA yang memiliki daya saing yang ingin dicapai oleh Kabupaten Pasuruan;
4. Rumusan arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA di Kabupaten Pasuruan;

1.5. Sasaran

Saran dari penelitian SIDA Kabupaten Pasuruan adalah tersusunnya dokumen penelitian SIDA di Kabupaten Pasuruan yang dalam hal ini difokuskan pada penyusunan *Roadmap* penguatan SIDA di Kabupaten Pasuruan. Beberapa dokumen yang dimaksud adalah:

1. Potensi daerah - SIDA yang memiliki daya saing di Kabupaten Pasuruan;
2. Tantangan dan peluang potensi daerah - SIDA yang memiliki daya saing di Kabupaten Pasuruan;
3. Kebijakan dan strategi dan program SKPD yang terkait penguatan SIDA di Kabupaten Pasuruan; dan
4. Stakeholder yang terkait dengan penyusunan roadmap SIDA di Kabupaten Pasuruan.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENDEKATAN

2.1. Kerangka Pemikiran

2.1.1. Inovasi Daerah

Beberapa pengertian dan istilah terkait dengan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2012 dan Nomor: 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengPenelitian , perekayasaan, dan pengoperasian (kelitbangan) yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
2. Sistem Inovasi Daerah (SIDa) adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
3. Lembaga Kelitbangan adalah institusi yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengPenelitian , perekayasaan, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan

konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) adalah Badan Penelitian dan Pengembangan atau lembaga lainnya di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan kelitbangan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain batasan normatif tersebut, "inovasi daerah" merupakan sebuah "inovasi yang menggambarkan bagaimana kapasitas inovatif suatu daerah" (Taufik, 2005:15). Kapasitas inovatif daerah adalah "potensi untuk menghasilkan inovasi dan mendifusikannya". Hal ini tidak hanya inovasi yang terwujud, melainkan juga kondisi-kondisi fundamental, investasi, dan kebijakan yang menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya inovasi dan difusinya.

Dengan mempertimbangkan kondisi riil di beberapa daerah di Indonesia, maka untuk mengkreasi inovasi daerah diperlukan sebuah upaya pendataan yang dimulai dari penataan konsep secara operasional, sehingga dapat diimplementasikan. Data yang berkaitan dengan profil inovasi daerah dinilai semakin penting untuk melengkapi dokumen "daerah dalam angka" yang umumnya telah diterbitkan secara reguler oleh setiap daerah. Profil demikian tidak saja penting sebagai gambaran/potret diri daerah yang bersangkutan di era pengetahuan tetapi juga sebagai bahan evaluasi/pemantauan tentang capaian-capaian oleh daerah dalam bidang yang sangat penting bagi pewujudan kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika perubahan dan tantangan global.

Inovasi yang perlu mulai dikembangkan di daerah antara lain mencakup beberapa data (ukuran/indikator) penting tentang masukan (*input*), aktivitas, dan keluaran (*output*) berkaitan dengan sistem inovasi (inovasi dan difusi serta pembelajaran) di daerah. Data tentang masukan (*input*) berkaitan dengan data/indikator yang menunjukkan (atau dapat membantu memahami gambaran tentang) potensi atau dukungan:

1. Ketersediaan sumber daya manusia,
2. Ketersediaan sumber dana (termasuk misalnya pembiayaan litbang oleh pemerintah dan swasta di daerah, serta pembiayaan bisnis lembaga bank dan non bank), dan
3. Ketersediaan infrastruktur iptek (lembaga litbang, laboratorium, perguruan tinggi).

Data aktivitas berkaitan dengan indikator yang menunjukkan (atau dapat membantu memahami gambaran tentang) aktivitas/proses yang dilakukan oleh para aktor atau keterkaitan antar aktor dalam sistem inovasi. Sebagai contoh adalah kerjasama litbang, kegiatan litbang kolektif, atau aktivitas kolaboratif lainnya yang relevan yang dilakukan oleh para aktor, yang penting bagi kemajuan/perkembangan dalam sistem inovasi daerah.

Sementara, data keluaran (*output*) berkaitan dengan indikator yang menunjukkan (atau dapat membantu memahami gambaran tentang) capaian yang telah dihasilkan, yang bersifat “langsung, antara ataupun merupakan dampak” yang penting bagi kemajuan/perkembangan sosial ekonomi daerah. Upaya penataan data demikian pada dasarnya merupakan langkah awal yang sangat penting untuk mengetahui dan mengembangkan profil inovasi daerah.

2.1.2. Daya Saing dan Kohesi Sosial Daerah

Pada akhir-akhir ini para pakar telah mulai melakukan Penelitian tentang daya saing daerah, selain Penelitian tentang daya saing dalam tataran internasional. Diakui memang bahwa Penelitian tentang daya saing daerah masih banyak kelemahan, namun hal itu menurut penulis sangat bermanfaat bagi daerah sekaligus sebagai langkah awal bagi daerah untuk memberikan gambaran "posisi" daerah yang bersangkutan dibandingkan dengan daerah lainnya.

Daya saing daerah dalam Penelitian ini dimaknai sebagai kemampuan daerah di dalam menciptakan/ mengembangkan dan menawarkan:

1. Iklim/lingkungan yang paling produktif bagi bisnis dan inovasi,
2. Daya tarik atau menarik "investasi," talenta (*talented people*), dan faktor-faktor mudah bergerak (*mobile factors*) lainnya, serta
3. Potensi berkinerja unggul secara berkelanjutan.

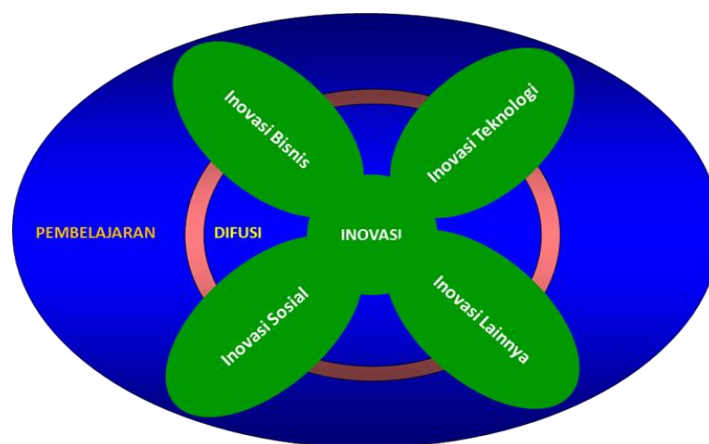
Sementara itu, yang dimaksud dengan kohesi sosial dalam hal ini identik dengan sebagaimana ditingkapkan oleh McCracken (1998) adalah karakteristik positif suatu komunitas/masyarakat berkaitan dengan hubungan antar anggota masyarakat yang bersangkutan (unit-unit dalam masyarakat, termasuk misalnya individu, kelompok, asosiasi).

2.1.3. Sistem Inovasi Daerah

Secara teoritik, sistem inovasi merupakan suatu jaringan lembaga di sektor publik dan swasta yang interaksinya

memprakarsai dan mendifusikan teknologi-teknologi baru. (Freeman, dikutip Taufik, 2005). Sistem dalam pengertian tersebut merupakan istilah yang menunjukkan cara pandang yang secara sadar melakukan suatu kesatuan aksi yang tidak bisa dipisahkan dalam konteks inovasi. Pandangan senada tentang pengertian sistem inovasi sebagaimana dikatakan oleh Metcalfe dikutip Taufik (2005), bahwa sistem inovasi merupakan sistem yang menghimpun institusi-institusi yang berbeda yang berkontribusi secara bersama dalam pengembangan dan difusi teknologi-teknologi baru dan menyediakan kerangka kerja yaitu pemerintah membentuk dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proses inovasi. Inovasi dapat dikatakan sebagai sebuah sistem manakala lembaga-lembaga yang terlibat, saling terkait untuk menciptakan dan mengolah pengetahuan atau keterampilan yang menentukan teknologi baru.

Lahirnya beberapa program inovasi, dan keterkaitannya dengan penguatan SIDA digambarkan sebagaimana pada bagan 2-1 sebagai berikut:



Bagan 2.1. : **Beragam Inovasi, Kesalingterkaitan & Efek Riak Penguatan**

Sumber : Taufik, "Penguatan Sistem Inovasi", Bahan Ringkas tentang Program BPPT, 2013, hal.5

Memahami bagan tersebut di atas terdapat 4 (empat) pengertian penting yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. **Inovasi** adalah sebuah proses atau hasil kreativitas pembaruan/perbaikan yang membawa (memberikan) kegunaan/kemanfaatan nyata (komersial/bisnis, ekonomi, sosial, dan/atau budaya);
2. **Difusi** merupakan suatu proses di mana inovasi dikomunikasikan melalui suatu saluran komunikasi tertentu dalam waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial atau masyarakat (Rogers, 1995, 1997 dikutip taufik 2013);
3. **Difusi teknologi** adalah kegiatan adopsi dan penerapan hasil inovasi secara lebih ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak-pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna potensinya (UU No. 18 tahun 2002);
4. **Pembelajaran** adalah suatu proses belajar (pendidikan-pengajaran, pelatihan, pengPenelitian , dan praktik serta evaluasi) yang membawa kepada pengembangan diri dan perbaikan sikap, perilaku dan tindakan.

Dengan memahami empat pengertian di atas, dapat dirumuskan bahwa proses pembelajaran menjadi titik awal untuk menemukan sebuah inovasi. Ketika inovasi ditemukan, diperlukan sebuah komunikasi antar stakeholder yang berkepentingan (difusi), sehingga inovasi baik dalam bentuk inovasi sosial, inovasi bisnis, inovasi teknologi, dan lainnya dapat dipelajari, dimengerti dan diterapkan di lingkungan yang kondusif dan mau menerima.

Dengan demikian, sistem inovasi merupakan suatu kesatuan yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan **inovasi**, **difusi**, dan **proses pembelajaran** dalam hal:

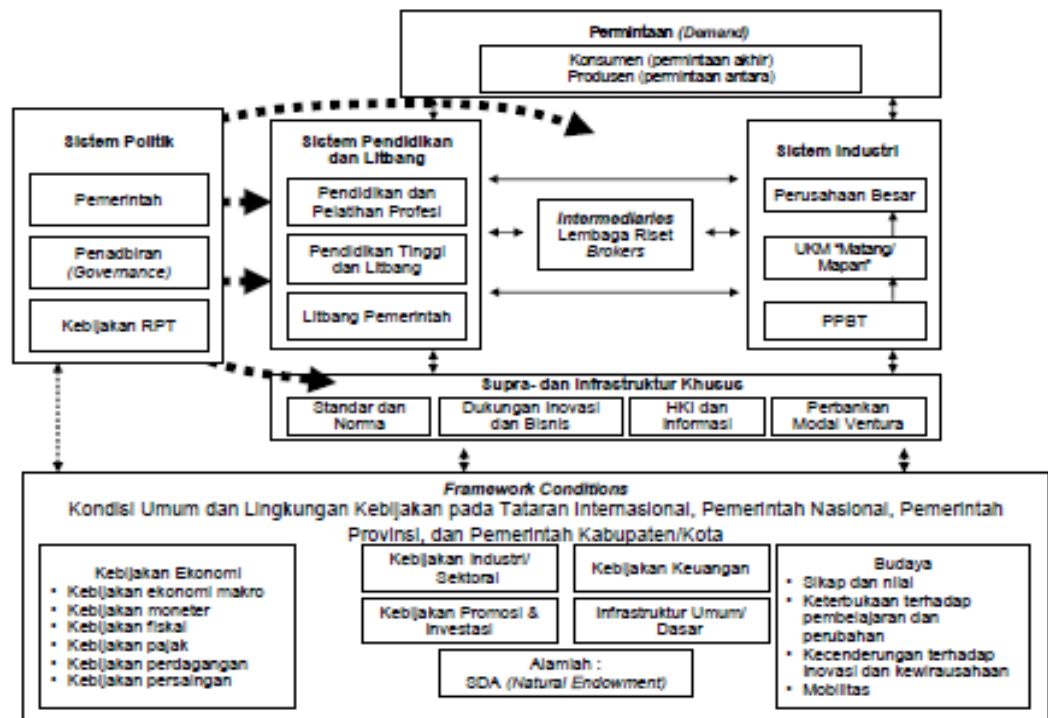
1. Pengembangan, penguasaan, pemajuan dan penerapan atau pemanfaatan iptek merupakan bagian integral dari sistem inovasi; dan
2. Bagaimana sub-subsistem (elemen atau faktor) berperan, kesalingterkaitannya (termasuk koherensi kebijakannya), dan dinamika interaksinya menentukan atau mempengaruhi kinerja dinamis sistem inovasi. (taufik 2013: 7).

Perkembangan konsep pembangunan saat ini menunjukkan bahwa “inovasi” bersifat erat dengan lingkungan lokal. Beberapa inovasi yang berkembang secara luas dan bersifat nasional, pada awalnya dikreasi dari inovasi lokal, yang *rawmaterial*-nya bersumber dari potensi lokal. Sehubungan dengan itu, manakala pemerintah berkeinginan untuk mengembangkan inovasi nasional, langkah awal dimulai dari penumbuhkembangan inovasi lokal atau inovasi daerah.

Dalam konteks daya saing, manakala inovasi daerah menjadi cikal bakalnya, dapat dipastikan inovasi tersebut memiliki daya saing. Hal ini dikarenakan inovasi daerah atau inovasi lokal, memiliki sumberdaya di daerah, memiliki karakteristik daerah yang tidak dimiliki daerah lain. Dengan demikian inovasi lokal selain memiliki daya saing, juga sulit dikembangkan di daerah lain yang tidak memiliki sumberdayanya.

Pada tahapan selanjutnya, inovasi lokal tersebut diperlukan pengelolaan ke dalam skala yang besar. Pengembangan potensi inovasi lokal diperlukan sebuah “penguatan sistem inovasi” yang mengintegrasikan seluruh inovasi lokal sebagai sub-sistem.

Penguatan sistem inovasi pada dasarnya merupakan suatu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan, hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan *best practice*) serta proses pembelajaran (Taufik, 2005), yang digambarkan secara skematik sebagaimana pada bagan 2-2 berikut.



Catatan : RPT = Riset dan Pengembangan Teknologi (Research and Technology Development)
 PPBT = Perusahaan Pemula (Baru) Berbasis Teknologi.

Bagan 2-2: Skematik Generik Sistem Inovasi

Sumber : Taufik, “Penyusunan Data Dasar Sistem Inovasi, Daya Saing, Dan Kohesi Sosial Daerah”, 2005, hal.2.

Pada bagan tersebut, terdapat 5 (lima) aspek yang mendapat perhatian dalam sistem inovasi dalam, yakni:

1. Aspek basis sistem sebagai tumpuan bagi proses inovasi beserta difusi inovasi. Keempat basis sistem ini berkaitan satu sama lainnya:
 - a. Tingkat analisis: mikro, meso dan makro;

- b. Aspek teritorial dan/atau administratif: misalnya sistem inovasi pada tataran supranasional (beberapa negara), nasional, dan sub-nasional (atau daerah).
 - c. Aspek bidang atau sektor: sistem inovasi sektoral dan klusterisasi.
 - d. Aspek basis aktivitas utama, misalnya sistem iptek (litbang) dan sistem produksi.
 2. Aktor dan/atau organisasi (lembaga) yang relevan dengan perkembangan inovasi (dan difusinya). Aktor tersebut dapat menjalankan suatu atau kombinasi peran berikut:
 - a. pelaku yang terlibat relatif "langsung".
 - b. pelaku yang terlibat relatif "tak langsung".
 - c. penentu/pembuat kebijakan.
 - d. pendukung dalam proses kebijakan inovasi.
 3. Kelembagaan, hubungan/keterkaitan dan interaksi antarpihak yang mempengaruhi inovasi dan difusinya. Tekanan diskusi biasanya diberikan pada isu-isu kelembagaan/institusional (dalam arti luas) seperti norma/nilai-nilai, kerangka dasar kebijakan, organisasi dan pengorganisasian dan/atau hubungan dalam rantai nilai (termasuk misalnya mekanisme transaksi) dalam sistem inovasi, baik yang bersifat bisnis maupun non-bisnis. Penelitian dalam hal ini dipandang semakin penting karena sangat berkaitan dengan isu-isu kegagalan pasar dan sistemik yang sangat mempengaruhi keberhasilan sistem inovasi.
 4. Fungsionalitas, yaitu menyangkut fungsi-fungsi utama sistem inovasi (dari elemen, interaksi dan proses inovasi dan difusi). Terkait dengan hal ini adalah isu proses

pembelajaran yang terjadi dalam sistem, yang kini semakin menonjol dalam diskusidiskusi tentang sistem inovasi.

5. Aktivitas, yaitu menyangkut upaya/proses atau tindakan penting dari proses inovasi dan difusi. Penadbiran inovasi yang baik dipandang semakin penting untuk mengembangkan aktivitas komprehensif namun lebih fokus, yang semakin terkoordinasi, dan dikembangkan bertahap sejalan dengan perkembangan dan konteksnya, serta diperbaiki secara terus-menerus.

Sehubungan dengan itu, maka Pemerintah Indonesia dalam menguatkan sistem inovasi nasional, terlebih dahulu menekankan pada sistem inovasi lokal atau daerah. Saat ini, Pemerintah Indonesia juga telah mengkonsepkan Pembangunan Nasional berbasis wilayah dengan strategi wilayah di setiap daerah yang berbeda. Kendati konsep pembangunan ini lebih difokuskan pada pembangunan ekonomi dengan membagi beberapa wilayah koridor pembangunan berdasarkan potensi lokalnya, tetapi sektor-sektor lainnya tentunya akan menyesuaikannya. Sebagai contoh koridor wilayah Sumatera dengan pengembangan sektor produksi dan pengolahan hasil bumi, wilayah Jawa dengan industri dan jasa nasional, hingga Maluku dan Papua sebagai pusat pengembangan pangan, perikanan, dan energi.

Dengan memahami dasar pemikiran tersebut, kemudian penting untuk menjadi acuan sekaligus arahan pemikiran dalam merealisasikan konsep SIDA. Sehubungan dengan itu, bahwa SIDA merupakan bagian integral dalam penyusunan Sistem Inovasi Nasional. Tekanan perhatian penyusunan SIDA lebih terfokuskan pada isu-isu kontekstual seperti:

1. **Potensi daerah** yang terkait dengan pengembangan sektor ekonomi tertentu terutama pada potensi lokal
2. **Stakeholder daerah** seperti perguruan tinggi, balai latihan kerja, laboratorium, dan fasilitas pendukung yang masih terkait dan berhubungan dengan pengembangan sistem inovasi daerah;
3. **Jaringan kelembagaan** yang berhubungan dengan inovasi serta penunjukan *good practices* dan peningkatan kapasitas;
4. **Kebijakan spesifik** yang berhubungan dengan perkembangan pengetahuan serta kemajuan perindustrian atau perekonomian daerah misalnya dengan memberikan dukungan investasi atau kebijakan lain yang bertujuan mempermudah dan memberikan manfaat yang maksimal.

2.1.4. Roadmap Penguatan SIDA

Secara harfiah, *roadmap* dapat diartikan sebagai "peta penentu atau penunjuk arah". Dalam arti istilah, "*roadmap is a detailed plan or explanation to guide you in setting standards or determining a course of action*" (Sebuah rencana rinci atau penjelasan yang dapat membimbing kita dalam menyusun sebuah standar atau menentukan suatu tindakan). Sehubungan dengan pengembangan sebuah kegiatan, maka *roadmap* adalah dokumen yang menjadi arahan (*direction*) untuk sebuah pengembangan yang bersifat strategis, berskala besar, dan dalam rentang waktu tertentu.

Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Pasuruan pada hakekatnya merupakan sebuah dokumen yang berisikan tentang keseluruhan proses yang terbentuk dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga

kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Lebih spesifik, *Roadmap* SIDA di Kabupaten Pasuruan berisikan tentang keterkaitan antara potensi daerah dan stakeholder yang menjadi program strategis dan terintegrasi dalam menumbuh kembangkan pengembangan ekonomi di Kabupaten Pasuruan.

Muatan dalam Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Pasuruan paling tidak terdapat beberapa unsur, yakni:

1. *Jelas*. Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Pasuruan harus mudah dipahami dan dapat dilaksanakan;
2. *Ringkas*. Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Pasuruan harus disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang ditentukan;
3. *Adjustable*. Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Pasuruan dapat mengakomodasi potensi-potensi daerah dan kepentingan stakeholder serta dapat menerima umpan balik dari stakeholder dalam rangka perbaikan-perbaikan dengan memperhatikan perkembangan pengetahuan dan teknologi;
4. *Terinci*. Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Pasuruan harus merupakan rincian dari potensi sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
5. *Komitmen*. Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Pasuruan merupakan kesepakatan bersama antar stakeholder yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran akan tanggungjawab dan diselesaikan secara bersama;

6. *Dokumen resmi*. Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Pasuruan merupakan dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Dengan memperhatikan unsur-unsur tersebut, efektivitas dan efisiensi yang dicapai melalui proses pengembangan harus terukur dan sistematis. Karena itu, prinsip Roadmap SIDa harus direncanakan secara realistis, implementasinya harus terukur, dan kontinuitas antar kegiatan harus terjaga.

Perencanaan SIDa yang realistis berarti sasaran pengembangan dan langkah-langkah SIDa yang akan dilaksanakan harus bisa dicapai dengan memperhatikan kondisi saat ini. Pengembangan SIDa dilakukan secara iteratif melalui beberapa tahapan, dan tiap tahapan dijalankan berdasarkan kondisi saat itu (*existing condition*), tiap tahapan memiliki target-target tertentu, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan berusaha membawa dari kondisi baseline ke pencapaian target-target tersebut. Prinsip berpegang pada realitas menjamin tiap langkah didasarkan pada kondisi yang sebenarnya, sehingga tiap kegiatan yang dilakukan selalu relevan (tidak mengada-ada).

Implementasi SIDa mensyaratkan kemampuan untuk “memotret” kondisi pada satu periode waktu tertentu, menyusun target-target yang dapat dicapai secara riil (*achievable*), dan merencanakan kegiatan-kegiatan yang efektif dalam mencapai target-target tersebut. Pengembangan yang bersifat iteratif juga mensyaratkan penahapan yang optimum, dalam arti tahap-tahap yang ditetapkan mampu menghadirkan efek peningkatan utilisasi SIDa yang optimum. Artinya, meskipun pengembangan SIDa masih berlangsung, output yang diperoleh saat itu telah bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Prinsip kedua, implementasinya harus terukur, digunakan untuk keperluan monitoring dan evaluasi. Dalam pelaksanaan pengembangan, kemajuan yang diperoleh harus dapat diukur dan dibandingkan. Kepentingan ini terkait juga dengan prinsip pertama, karena untuk bisa menjalankan tahapan berikutnya, harus diketahui dahulu kemajuan yang dicapai dalam tahapan sebelumnya. Keterukuran dicapai melalui identifikasi sasaran-sasaran dan indikator pencapaiannya. Indikator-indikator ini bersifat kuantitatif dan digunakan sebagai acuan (*reference*) dalam pengukuran ketercapaian sasaran. Dengan membandingkan antara kondisi *baseline*, kondisi yang harus dicapai (sasaran yang ditetapkan), dan capaian yang sebenarnya, dapat diketahui seberapa jauh tingkat kemajuan pengembangan. Pengetahuan tentang kemajuan ini sangat berguna untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Seandainya ada penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan, hasil pemantauan (*monitoring*) dapat menjadi dasar bagi usaha-usaha perbaikan dan akselerasi.

Prinsip ketiga, kontinuitas antar kegiatan harus terjaga, berfungsi menjalin satu kegiatan dengan kegiatan lain dalam membangun satu rangkaian program yang utuh. Kontinuitas kegiatan dimulai sejak tahap perencanaan. Penyusunan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan urutan dan persyaratan (*prerequisite*) dari tiap kegiatan. Ada kegiatan yang baru dapat dimulai setelah kegiatan *prerequisite*-nya diselesaikan. Selanjutnya kontinuitas antar kegiatan harus dijaga pada saat implementasi kegiatan-kegiatan pengembangan, terutama dari aspek ketersediaan sumber daya (SDM dan anggaran). Namun diakui sering ditemukan bahwa terdapat kendala yang sering muncul dalam implementasi adalah komitmen untuk mengalokasikan dana

dan sumber daya dalam rencana anggaran tahunan kurang mendukung, sehingga kontinuitas program kurang dapat terjaga. Merujuk pada kondisi riil tersebut diharapkan bahwa dukungan sumberdaya dan anggaran dalam Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Pasuruan, perlu menjadi perhatian.

Secara keseluruhan, Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Pasuruan, tentunya perlu memperhatikan dinamika perekonomian lokal, regional, nasional dan global. Tujuannya tidak lain adalah agar Pemerintah Kabupaten Pasuruan memiliki spesifikasi pengembangan potensi daerah dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah pada sektor-sektor produktif dan prospektif. Dengan tujuan tersebut langkah-langkah yang menjadi pemikiran atau bahan renungan bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan, menurut hemat analist, paling tidak dapat ditempuh cara sebagai berikut:

1. Suatu Pemerintah Kabupaten dengan sejumlah keterbatasannya tidak mungkin akan mengerjakan pengembangan sumberdaya daerah tanpa memilih sektor atau sumberdaya prioritas atau unggulan. Karena itu penekanan pemilihan sektor prioritas atau potensial menjadi penting; dan
2. Dalam rangka untuk meningkatkan performa implementasi roadmap SIDa di Kabupaten Pasuruan, diperlukan sebuah *political will* yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan bekerjasama sinergis dengan para stakeholder SIDa.

2.1.5. Kebijakan Penguatan SIDa

Kebijakan penguatan SIDa dalam rangka menumbuhkan kembangkan kemampuan daerah dan daya saing daerah perlu diarahkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,

agar tujuan pembangunan dapat dicapai secara optimal, efektif, dan efisien. Pengembangan kemampuan daerah dan daya saing daerah menurut Peraturan bersama Menristek dan Mendagri No. 3 tahun 2012 dan No. 32 tahun 2012 diperlukan adanya proses, yakni penyusunan Roadmap penguatan SIDA yang berfungsi sebagai pedoman untuk mengimplementasikan berbagai inisiatif dan rencana strategis daerah.

Potensi daerah atau produk unggulan daerah yang perlu diintervensi dengan kebijakan penguatan SIDA adalah potensi daerah atau produk daerah yang bernilai prospektif dan berdaya saing secara berkelanjutan. Sementara ini, potensi di Kabupaten Pasuruan yang bernilai prospektif dan berdaya saing secara berkelanjutan serta memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan terdapat tiga sektor, yakni: sektor industri pengolahan, sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel, dan restoran.

Selain itu, potensi daerah yang memberikan kontribusi terhadap lapangan usaha dan dikombinasikan dengan kemampuan menciptakan atau menyerap tenaga kerja daerah setempat, dan berdaya saing secara berkelanjutan dapat diduga sektor pertanian yang akan lebih unggul, diikuti oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran, dan seterusnya. Kondisi semacam ini, dapat digunakan sebagai kriteria atau sudut pandang untuk menentukan keunggulan potensi daerah dan daya saing daerah.

Peraturan bersama Menristek dan Mendagri No. 3 tahun 2012 dan No. 32 tahun 2012 mengatur bahwa peningkatan daya saing daerah dapat dilakukan melalui penguatan SIDA, yang meliputi:

- 1) Kebijakan penguatan SIDA yang tercantum dalam: i) *Roadmap* penguatan SIDA, ii) RPJMD; dan iii) RKPD;
- 2) Penataan unsur SIDA, yang meliputi: i) Kelembagaan SIDA; ii) Jaringan SIDA; dan iii) Sumber daya SIDA; dan
- 3) Pengembangan SIDA, yang meliputi kegiatan: i) Pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah; ii) Pemetaan potensi dan analisis SIDA; dan iii) Pemberlanjutan penguatan SIDA.

Dalam rangka menyusun kebijakan penguatan SIDA, khususnya *Roadmap* atau peta rencana penguatan SIDA, diperlukan adanya dukungan data, yang dapat digunakan sebagai bahan analisis dalam rangka mendapatkan informasi berikut:

- a. Kondisi SIDA saat ini;
- b. Tantangan dan peluang SIDA;
- c. Kondisi SIDA yang akan dicapai;
- d. Arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA;
- e. Fokus dan program prioritas SIDA; dan
- f. Rencana aksi penguatan SIDA.

Roadmap penguatan SIDA yang dimaksud, mengakomodasi seluruh program dan kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Prov.), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Kota (APBD Kab./Kota) dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

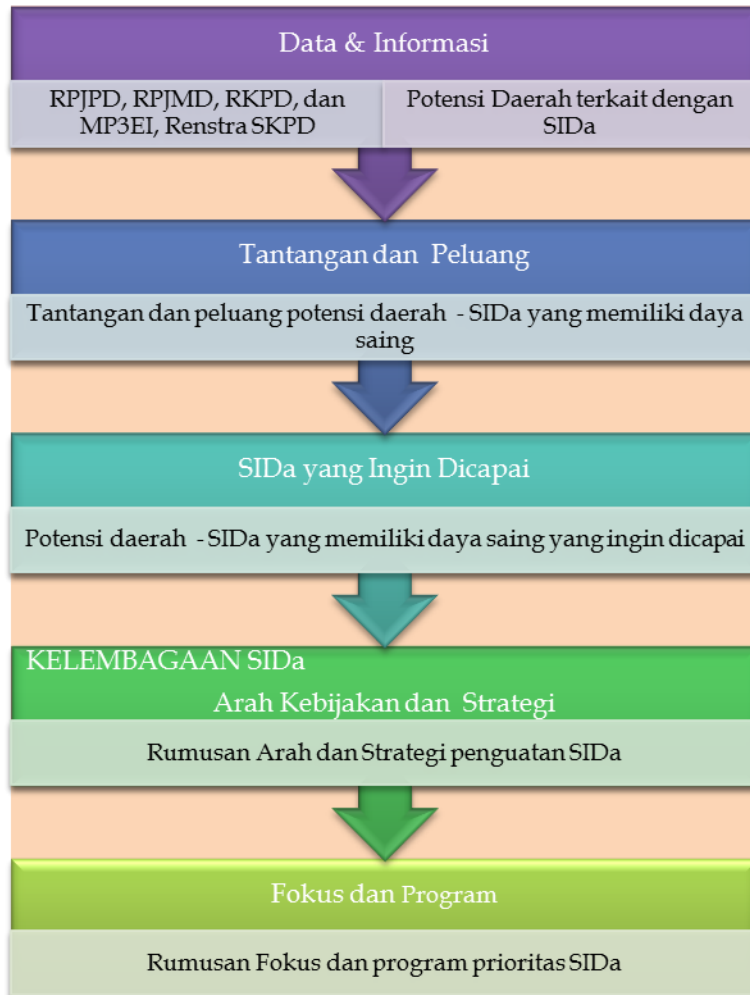
2.2. METODE PENDEKATAN

2.2.1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari kegunaannya, Penelitian ini adalah Penelitian atau penelitian terapan, maksudnya, hasil analisis data atau informasi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan penelitian ini adalah informasi yang erat kaitannya dengan *Roadmap* penguatan SIDA yang akan dirumuskan atau disusun oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Ditinjau dari rancangannya dan/atau tingkat analisis yang digunakan, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan mendeskripsikan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Dalam mendeskripsikan tujuan penelitian penelitian, penulis berusaha menyajikan secara sistematis mengenai data yang berhasil dikumpulkan dan fenomena yang dianalisis merupakan sesuatu yang diutamakan dalam Penelitian ini. Output Penelitian ini adalah merupakan konsep atau naskah akademik *Roadmap* penguatan SIDA Kabupaten Pasuruan, yang memuat informasi sebagaimana yang dimaksud dalam *Roadmap* penguatan SIDA menurut Peraturan bersama Menristek dan Mendagri No. 3 tahun 2012 dan No. 36 tahun 2012.

2.2.2. Alur Penelitian Penguatan SIDA

Alur penelitian penguatan SIDA Kabupaten Pasuruan, khususnya dalam penyusunan awal roadmap penguatan SIDA, diperlukan adanya dukungan data dan informasi yang cukup. Berdasarkan data dan informasi tersebut kemudian di analisis secara bertahap sebagaimana langkah-langkahnya teruraikan dalam alur penelitian sebagai berikut:



2.2.3. Jenis dan Sumber Data

Diketahui dari jenisnya, penelitian ini akan menggunakan data sekunder dan data primer, baik yang diukur secara numerik maupun yang diukur secara katagorik. Data sekunder yang dimaksud adalah data yang sudah tersedia pada institusi, atau dokumen lainnya. Data primer yang dimaksud adalah data yang didapat berdasarkan hasil wawancara dengan sampel atau informan penelitian ini. Kelompok data yang akan dikumpulkan dalam penyelenggaraan penelitian ini, disesuaikan dengan kebutuhan data untuk penyusunan *Roadmap* penguatan

SIDa, sebagaimana yang telah diuraikan di depan. Untuk memudahkan dalam mencari kecenderungan, memberikan pemaknaan dan/atau menginterpretasikan hasil analisis data, dalam penyelenggaraan penelitian ini akan diupayakan untuk bisa memperoleh data rentang waktu (*time series data*).

2.2.4. Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau institusi yang dimintai keterangan atau informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian penguatan SIDa di Kabupaten Pasuruan institusi yang menjadi subyek penelitian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan bersama Menristek dan Mendagri No. 3 tahun 2012 dan No. 36 tahun 2012, pasal 15 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Sampel Menurut Posisinya Dalam Lembaga SIDa

No	Institusi	Unit Kerja	Jumlah Informan
1	Instansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan	1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1
		2) Dinas Koperasi dan UKM	1
		3) Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan	1
		4) Dinas Peternakan dan Kehewanan	1
		5) Dinas Kelautan dan Perikanan	1
		6) Dinas Perkebunan dan Kehutanan	1
		7) Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1
2	Lembaga Kelitbangan	Balitbang Diklat	1
3	Lembaga Penunjang Inovasi	Laboratorium Hama dan Penyakit	1

No	Institusi	Unit Kerja	Jumlah Informan
4	Lembaga Pendidikan	Unmer Pasuruan	1
		SMK	3
5	Dunia Usaha	Perusahaan yang memiliki dan concern terhadap pengembangan produk unggulan di Kabupaten Pasuruan (PT Sampoerna, Tbk.)	1
6	Organisasi Kemasyarakatan di Daerah	LSM yang pada bidang/ sektor produk unggulan	1
JUMLAH INSTITUSI			15

2.2.5. Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan pengumpulan data untuk Penelitian ini dilaksanakan melalui:

1. **Wawancara terstruktur**, yakni wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang telah direncanakan terhadap informan. Penggunaan teknik ini didasarkan pada pertimbangan untuk bisa mendapatkan data yang detail dan yang dapat mengakomodasi variasi jawaban informan dari masing-masing variabel.
2. **Studi dokumen**, pengPenelitian, pemilihan, dan pencatatan terhadap data sekunder yang relevan, termasuk di dalamnya adalah pengambilan copy dokumen, foto, gambar dan data pendukung lain merupakan bagian penting dari metode ini.

2.2.6. Metode Analisis dan Interpretasi Hasil Analisis Data

Atas dasar pertimbangan jenis pengukuran data yang digunakan dalam Penelitian ini dan dengan tetap memperhatikan kebutuhan hasil analisis untuk merealisasikan tujuan Penelitian ini,

maka analisis data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang didalamnya meliputi proses mengorganisir data berdasarkan kategori tertentu dan/atau tabel frekuensi. Analisis data kualitatif terdiri atas tiga alur kegiatan, meliputi:

1. **Reduksi data;** yakni proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan final yang mencerminkan keadaan dan apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan dapat diverifikasi dengan baik.
2. **Penyajian data;** adalah penyediaan sekumpulan data yang disusun secara sistimatis sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh selama penyelenggaraan survey. Bentuk penyajian data yang dimaksud dapat berupa: teks naratif, tabel, matriks, grafik, bagan; yang kesemuanya dirancang untuk menyajikan hasil survei kedalam bentuk yang padu dan mudah dipahami, sehingga bisa memberi arahan dan kemungkinan untuk dilakukan penarikan kesimpulan dan/atau dipakai memprediksi aspek tindakan yang perlu dilakukan.
3. **Menarik kesimpulan dan verifikasi;** merupakan bagian akhir proses analisis; yaitu mencari dan memberi arti, membuat konfigurasi dan kategori-kategori, mengukur alur sebab akibat yang dapat digunakan menarik kesimpulan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

LOKASI PENELITIAN

Kabupaten Pasuruan adalah satu diantara 38 kabupaten dan/atau kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, yang kondisinya dapat dicermati dari beberapa sudut pandang, contohnya berdasarkan sudut pandang kondisi: i) geografis, ii) demografis dan ketenagakerjaan, iii) pemerintahan, iv) perekonomian, v) ketertiban dan keamanan, dan lain sebagainya. Mengacu pada obyek Penelitian ini, maka kondisi wilayah Kabupaten Pasuruan yang dideskripsikan dalam laporan ini adalah:

1. Kondisi geografis dan potensi Kabupaten Pasuruan;
2. kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan;
3. kondisi penduduk dan ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan; dan
4. kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana yang dimaksud dalam uraian berikut ini.

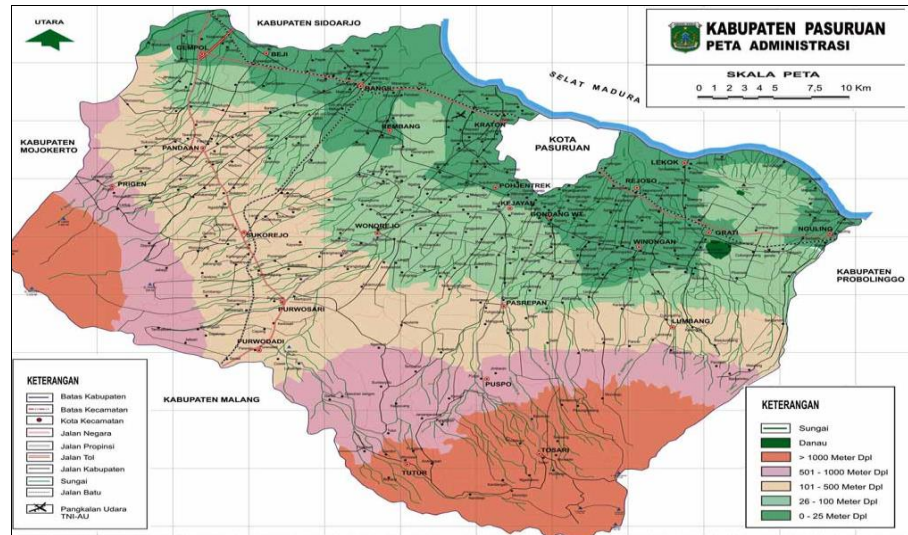
3.1. Kondisi Geografis dan Topografis, Strategis, Hidografis dan Infrastruktur

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Pasuruan terletak antara 112^o.30' - 113^o.30' Bujur Timur dan 7^o 30' - 8^o 30' Lintang Selatan. Ditinjau dari letaknya, Kabupaten Pasuruan mempunyai letak yang sangat strategis karena berada antara Surabaya-Malang, Surabaya-Probolinggo, dan Probolinggo-Malang, yang sarana transportasinya relatif lancar. Secara Administratif, Kabupaten Pasuruan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Selat Madura di sebelah Utara, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Malang, di sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Probolinggo, dan

di sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Mojokerto.

Gambar 3.1
Peta Administrasi Kabupaten Pasuruan



2. Kondisi Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Pasuruan terkait erat dengan kondisi ketinggian dan kelerengan untuk tingkat kelerengan dibagi menjadi 7 yaitu :

1) Kelerengan 0 - 2% :

Wilayah yang dimaksud antara lain adalah seluruh Kecamatan Bangil, Rembang, Kraton, Pohjentrek, Gondangwetan, Rejoso dan Lekok, sebagian Kecamatan Pasrepan, Kejayan, Wonorejo, Winongan, Grati dan Nguling.

2) Kelerengan 2 - 5% :

Wilayah yang dimaksud antara lain adalah sebagian dari Kecamatan Purwodadi, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Wonorejo, Purwosari, Prigen, Sukorejo, Pandaan, Gempol, Beji, Winongan, Grati dan Nguling.

3) Kelerengan 5 – 8% :

Wilayah yang dimaksud antara lain adalah sebagian Kecamatan Purwodadi, Tukur, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Purwosari, Prigen, Sukorejo, Pandaan, Gempol, Beji, Winongan dan Lekok.

4) Kelerengan 8 – 15%:

Wilayah dimaksud antara lain adalah sebagian Kecamatan Purwodadi, Tukur, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Purwosari, Prigen, Pandaan, Gempol, Winongan dan Grati

5) Kelerengan 15 – 25%:

Wilayah dimaksud antara lain adalah sebagian Kecamatan Purwodadi, Tukur, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Purwosari, Prigen, Gempol dan Beji.

6) Kelerengan 25 – 45%:

Wilayah dimaksud antara lain adalah sebagian Kecamatan Purwodadi, Tukur, Puspo, Tosari, Lumbang, Purwosari, Prigen dan Gempol.

7) Kelerengan > 45% :

Wilayah dimaksud antara lain adalah sebagian Kecamatan Tukur, Puspo, Tosari, Lumbang, dan Prigen.

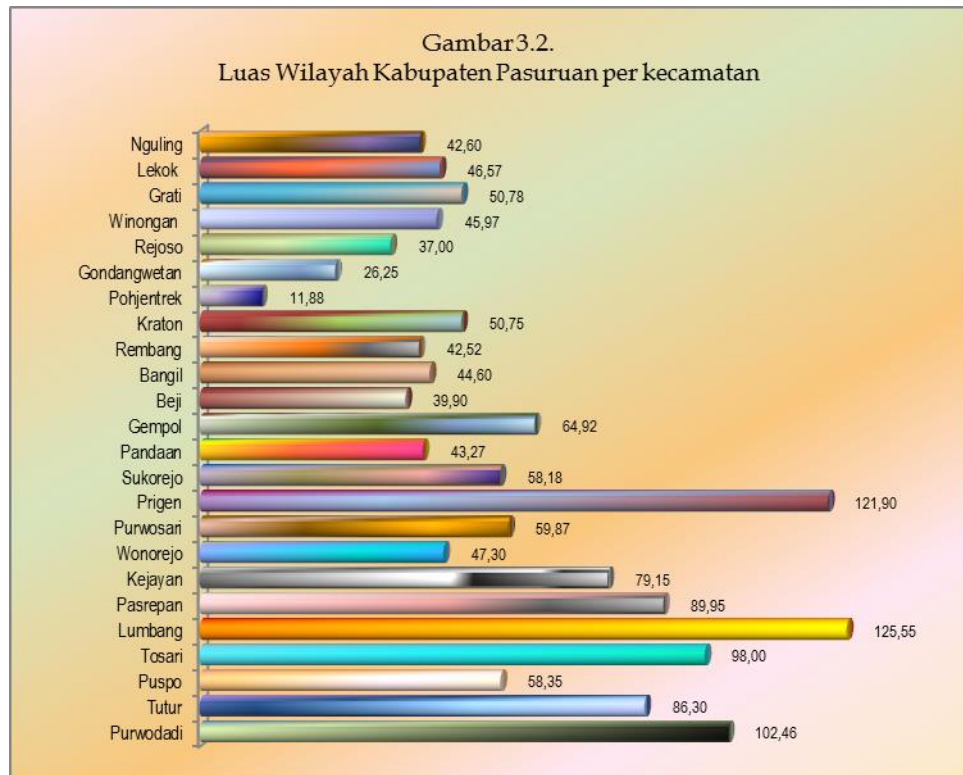
Sedangkan untuk kondisi ketinggian dapat digambarkan menjadi enam macam, yaitu :

- 1) Wilayah pesisir dengan ketinggian 0 - 12,5 mdpl seluas 18.819,04 ha atau 12,77%. Wilayah ini sesuai untuk pengembangan usaha perikanan dan pertambakan dengan lokasi penyebaran pada sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Beji, Bangil, Rembang, Kraton, Pohjentrek, Gondangwetan, Rejoso, Winongan, Grati, Lekok dan Nguling.

- 2) Wilayah pantai di Kabupaten Pasuruan terdiri atas kecamatan Bangil, Kraton, Rejoso, Lekok dan Nguling.
- 3) Wilayah dataran dengan ketinggian 12,5 - 500 mdpl seluas 50.384,02 ha atau 34%. Wilayah ini sesuai untuk pengembangan pertanian, permukiman, perindustrian dengan lokasi berada pada sebagian wilayah kecamatan - kecamatan di Kabupaten Pasuruan kecuali Kecamatan Tosari.
- 4) Wilayah perbukitan dengan ketinggian 500-1000 mdpl seluas 21.877,17 ha atau 14,84% dari luas wilayah. Peruntukannya sesuai untuk tanaman keras/tahunan dan sebagai penyangga bagi kawasan perlindungan tanah dan air serta untuk lahan pertanian tanaman pangan dengan sistem teras siring, meliputi sebagian kawasan Kecamatan Lumbang, Gempol, Purwodadi, Tukur, Tosari, Pasrepan, Puspo, Purwosari, dan Prigen.
- 5) Wilayah pegunungan dengan ketinggian 1.000-2.000mdpl seluas 18.615,08 ha atau 12,63% dari luas wilayah berfungsi sebagai kawasan penyangga untuk perlindungan tanah dan air, meliputi sebagian kawasan Kecamatan Purwodadi, Tukur, Tosari, Lumbang, Puspo, Purwosari dan Prigen.
- 6) Wilayah dengan ketinggian > 2000 mdpl seluas 7.920,77 ha atau sekitar 5,37% dari luas wilayah, dengan peruntukan sebagai hutan lindung yang berfungsi untuk melindungi kawasan bawahannya, tersebar pada sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, Tukur, Tosari, Lumbang, Puspo, Purwosari, dan Prigen.

Ditinjau dari luas wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan, Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan Lumbang, yang luasnya 125,55 Km² (8,51 persen dari luas Kabupaten Pasuruan), diikuti oleh Kecamatan

Prigen, yang luasnya 121,90 Km² (8,27 persen dari luas Kabupaten Pasuruan), dan Kecamatan Purwodadi, yang luasnya 102,46 Km² (6,95 persen dari luas Kabupaten Pasuruan).



Kabupaten Pasuruan merupakan wilayah yang memiliki daerah datar maupun pegunungan dengan ketinggian 0 hingga lebih dari 1.000 m dari permukaan laut. Wilayah yang memiliki ketinggian rata-rata hingga 100 m dpl (di atas permukaan laut) ada 14 Kecamatan, yaitu Kejayan, wonorejo, gempol, Beji, Bangil, rembang, Kraton, Pohjentrek, Gondangwetan, Rejoso, Winongan, Grati, Lekok dan Nguling. Wilayah yang mempunyai ketinggian rata-rata 100 hingga 500 m dpl sebanyak 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Purwodadi, Lumbang, Pasrepan, Purwosari, Sukorejo dan Pandaan. Sedang wilayah yang mempunyai ketinggian rata-

rata diatas 500 m dpl ada sebanyak 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tutur, Puspo, Tosari dan Kecamatan Prigen.

Sungai yang terdapat di Kabupaten Pasuruan sebanyak 7 sungai dan kesemua sungai tersebut, adalah sungai Lawean, Sungai Rejoso, Sungai Gembong, Sungai Welang, Sungai Masangan, Sungai Kedunglarangan dan Sungai Petrung, dimana dua diantara sungai tersebut mengalir wilayah Kecamatan Bangil. Semua sungai tersebut memiliki irigasi teknis yang sangat kondusif digunakan untuk area pertanian tanaman pangan khususnya padi. Sementara wilayah yang merupakan daerah pesisir di dekat pantai cukup potensial untuk budidaya ikan maupun produksi ikan laut.

Mengingat wilayah Kabupaten Pasuruan sebagian besar mempunyai kemiringan antara 0-2%, dan ketinggiannya mempunyai range antara 0 - 10 meter dari permukaan laut maka keberadaan sungai tersebut disamping menguntungkan juga merugikan karena di musim penghujan rawan banjir terutama di wilayah bagian utara. Hal ini disebabkan karena didaerah tersebut terdapat bagian yang agak cekung, sehingga menghambat pembuangan air kelaut.

3. **Kondisi Strategis**

Letak wilayah daerah Kabupaten Pasuruan, dilihat dari segi ekonomi sangat strategis, karena terletak pada delta jalur raya ekonomi Surabaya - Jember/Banyuwangi/Bali, Surabaya - Malang dan Malang - Jember/ Banyuwangi/ Bali. Terlebih lagi dengan adanya rencana pembangunan jalan tol Gempol - Pandaan dan Gempol - Pasuruan semakin membuat Kabupaten Pasuruan menjadi pilihan yang tepat bagi pengembangan industri, mengingat jarak tempuh ke Surabaya tidak terlalu jauh.

4. Kondisi Hidrografis

Di wilayah Kabupaten Pasuruan mengalir enam sungai besar yang bermuara di Selat Madura, yaitu Sungai Lawean, Sungai Rejoso, Sungai Gembong, Sungai Welang, Sungai Masangan dan Sungai Kedunglarangan. Oleh karena itu tingkat pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian cukup memadai. Selain potensi sungai di atas, terdapat danau dan sejumlah mata air. Danau Ranu Grati dengan volume efektif sebesar 5.013m^3 dan volume maximum sebesar 5.217m^3 mampu mengeluarkan debit maximum 980 l/det dan debit minimum 463 l/det. Selain itu terdapat 471 sumber mata air yang tersebar di 24 kecamatan dengan debit air antara 1 sampai dengan 5.650 liter/detik. Yang terbesar adalah Sumber Air Umbulan di Kecamatan Winongan dengan debit maximumnya 5.650 l/det; lalu Sumber Air Banyu Biru yang juga terletak di Kecamatan Winongan dengan debit maximumnya 225 l/det. Sedangkan pada lereng perbukitan banyak ditemui sumur-sumur bor tertekan (artesis) atau tak tertekan dengan debit sekitar 5-10 liter/detik.

5. Kondisi Infrastruktur

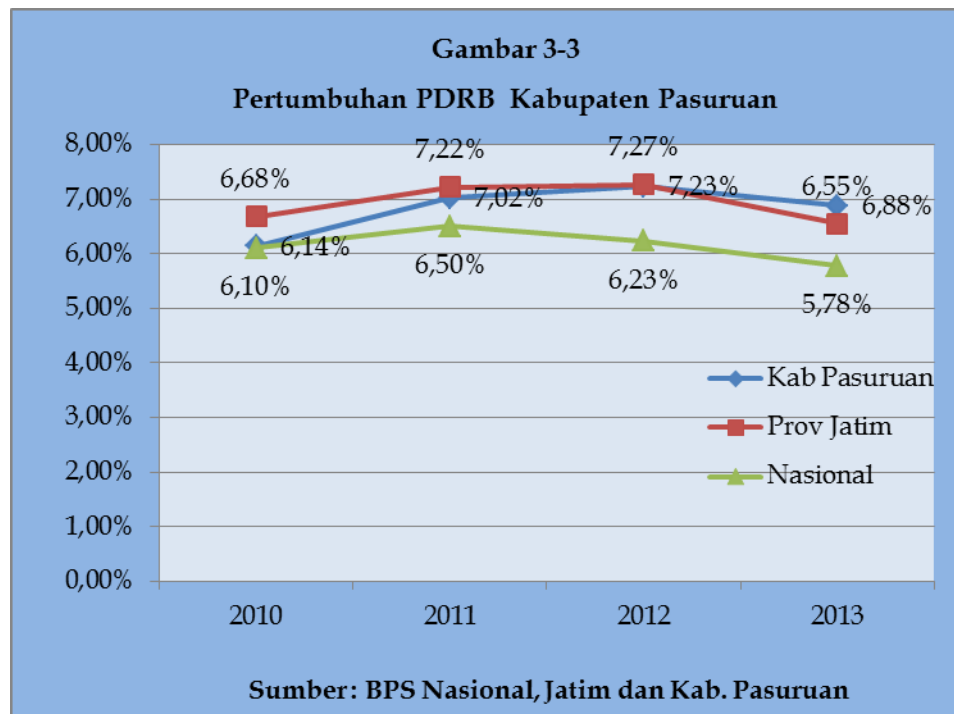
Kelancaran arus transportasi untuk kegiatan ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana jalan. Di wilayah Kabupaten Pasuruan, prasarana jalan terbagi menjadi jalan nasional sepanjang 86,83 km, jalan provinsi sepanjang 73,93 km dan jalan Kabupaten sepanjang 2.324,21 km. Selain itu di wilayah Kabupaten Pasuruan dilewati jalur kereta api dan terdapat satu stasiun kereta api yang menghubungkan jalur Surabaya - Malang/Blitar dan Surabaya - Jember/Banyuwangi.

3.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan

3.2.1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan dapat dicermati dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2000, sebagaimana yang tersebut dalam gambar 3.3.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Pasuruan, volume PDRB tahun 2012 berdasarkan PDRB ADHK tahun 2000 sebesar Rp.7.785,92 milyar, sedangkan volume PDRB tahun 2011 sebesar Rp.7.267,97 milyar. Berdasarkan pedoman tersebut pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2010-2012 terjadi kenaikan yakni 6.14% tahun 2010 menjadi 7,23% tahun 2012. Namun demikian pada tahun 2013 terjadi penurunan menjadi 6.88%.



Kondisi naik turunnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan sesungguhnya seiring dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dimana pada tahun 2010 pertumbuhannya sebesar 6.68% kemudian tahun 2012 menjadi 7.27% dan di akhir

tahun 2013 turun menjadi 6.55%. (sumber data: website BPS Jawa Timur). Sementara itu pertumbuhan ekonomi secara nasional pada tahun 2013 diperkirakan mencapai kisaran 5.6% sampai dengan 5.8% (sumber data: media online antaranews.com), sedangkan tahun 2013 tumbuh sebesar 6.23% (sumber data: website BPS).

Kondisi semacam tersebut menggambarkan bahwa regulasi dan kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, secara secara simultan mampu menjadi lokomotif dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan aktivitas usaha produktif barang dan jasa di Kabupaten Pasuruan. Untuk memahami pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan dapat dilihat dari perkembangan PDRB dan Income percapita Kabupaten Pasuruan sebagaimana yang diuraikan berikut ini.

3.2.2. PDRB Per-Sektor

Perkembangan PDRB Kabupaten Pasuruan ditinjau dari masing-masing sektor atau lapangan usaha sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 3-1.

Tabel 3.1.

Pertumbuhan Sektoral PDRB ADHK Tahun 2000 (dalam %)

No	SEKTOR	2010	2011	2012	2013
1	Pertanian	4,79	5,69	5,34	5,28
2	Pertambangan dan Penggalian	-6,20	2,92	3,16	3,12
3	Industri Pengolahan	6,13	7,15	7,69	6,95
4	Listrik Gas dan Air Bersih	7,91	9,63	7,30	8,92
5	Bangunan	10,24	8,49	8,68	6,69
6	Perdagangan, hotel dan restoran	7,81	8,24	8,88	8,55
7	Angkutan dan komunikasi	7,78	9,32	7,01	8,91
8	Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan	6,37	8,19	7,65	7,59
9	Jasa-jasa	4,92	5,28	6,25	5,46
PERTUMBUHAN EKONOMI		6,14	7,02	7,23	6,88

Sumber data : BPS Kabupaten Pasuruan

Tabel tersebut mengindikasikan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir perekonomian Kabupaten Pasuruan selalu menunjukkan pergerakan yang positif dari tahun ke tahun. Namun demikian terkait dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional, maka tahun 2013 terjadi penurunan.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi ditinjau dari masing-masing sektor atau lapangan usaha tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 secara komulatif nilai sektor pada tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012. Sementara sektor yang menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan adalah sektor pertambangan dan penggalian, listrik gas dan air bersih, angkutan dan komunikasi Ketiga sektor tersebut mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan di tahun 2013.

Tabel 3.2.

**Volume PDRB Kabupaten Pasuruan Tahun 2010-2013
Atas Dasar Harga Berlaku (dalam jutaan rupiah)**

NO	SEKTOR	2010	2011	2012*	2013**
I	KELOMPOK PRIMER				
1	Pertanian	3.860.980,50	4.405.719,93	4.982.079,65	5.690.645,33
2	Pertambangan dan Penggalian	152.478,83	161.839,00	170.480,58	180.839,75
	Sub Total	4.013.459,33	4.567.558,93	5.152.560,23	5.871.485,08
II	KELOMPOK SEKUNDER				
3	Industri Pengolahan	4.879.405,67	5.642.556,37	6.490.535,12	7.477.111,30
4	Listrik, Gas Dan Air Minum	319.443,91	373.909,65	436.285,57	499.972,25
5	Bangunan	467.638,21	484.362,32	567.521,23	640.475,60
	Sub Total	5.666.487,79	6.500.828,34	7.494.341,92	8.617.559,15
III	KELOMPOK TERSIER				
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	3.167.935,55	3.561.759,01	3.993.535,49	4.459.201,61
7	Angkutan dan Komunikasi	566.633,20	649.687,17	740.455,50	848.858,07
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	568.538,37	640.152,6	724.839,97	820.648,64
9	Jasa-jasa	1.590.166,14	1.735.874,61	1.916.690,53	2.112.940,26
	Sub Total	5.893.273,26	6.587.473,39	7.375.521,49	8.241.648,58
	Volume Ekonomi (PDRB)	15.573.220,39	17.655.860,68	20.022.423,70	22.730.692,85

Sumber data: BPS Kabupaten Pasuruan

Keterangan :

* = Angka diperbaiki

**= Angka sementara

Untuk melihat corak kegiatan ekonomi di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat melalui kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pasuruan. Seiring berjalannya waktu, tentu akan ditemui pergeseran kontribusi dari masing-masing sektor, ada sektor yang semakin tinggi kontribusinya, dan akan dibarengi dengan menurunnya kontribusi sektor lainnya. Di bawah ini disajikan gambaran struktur ekonomi

Kabupaten Pasuruan tahun 2010 dan tahun 2013 sebagaimana yang dimaksud dalam tabel 3.2. dan tabel 3.3.

Tabel 3.3.

Kontribusi Sektoral PDRB ADHB Tahun 2010-2013 (dalam %)

No	SEKTOR	2010	2011	2012*	2013**
I	KELOMPOK PRIMER				
1	Pertanian	24,79	24,95	24,88	25,04
2	Pertambangan dan Penggalian	0,98	0,92	0,85	0,80
	Sub Total I	25,77	25,87	25,37	25,84
II	KELOMPOK SEKUNDER				
3	Industri Pengolahan	31,33	31,96	32,42	32,89
4	Listrik,Gas dan Air Minum	2,05	2,12	2,18	2,20
5	Bangunan	3,00	2,74	2,83	2,82
	Sub Total II	36,38	36,82	37,43	37,91
III	KELOMPOK TERSIER				
6	Perdagangan,Hotel dan Restoran	20,34	20,17	19,95	19,62
7	Angkutan dan Komunikasi	3,64	3,68	3,70	3,73
8	Keuangan,Persewaan dan Jasa Perusahaan	3,65	3,63	3,62	3,61
9	Jasa-jasa	10,21	9,83	9,57	9,30
	Sub Total III	34,19	34,19	36,84	36,26
	VOLUME EKONOMI (PDRB)	100	100	100	100

Sumber data: BPS Kabupaten Pasuruan

Keterangan:

* = Angka revisi

**= Angka sementara

Pada tahun 2010, sektor industri pengolahan mampu memberikan kontribusi paling besar dalam perekonomian Kabupaten Pasuruan, yakni sebesar 31,33% dan tahun 2013 menjadi 32,89% dari total PDRB Kabupaten. Kemudian diikuti oleh sektor Pertanian dengan kontribusi sebesar 24,79% tahun 2010 dan 25,04% tahun 2013. Sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 20,34% tahun 2010 dan tahun 2013 menurun menjadi 19,62%. Sementara itu, sektor konstruksi, sektor listrik, gas, dan air bersih, serta sektor

pertambangan dan pertambangan, memiliki kontribusi yang kecil dibandingkan sektor lainnya.

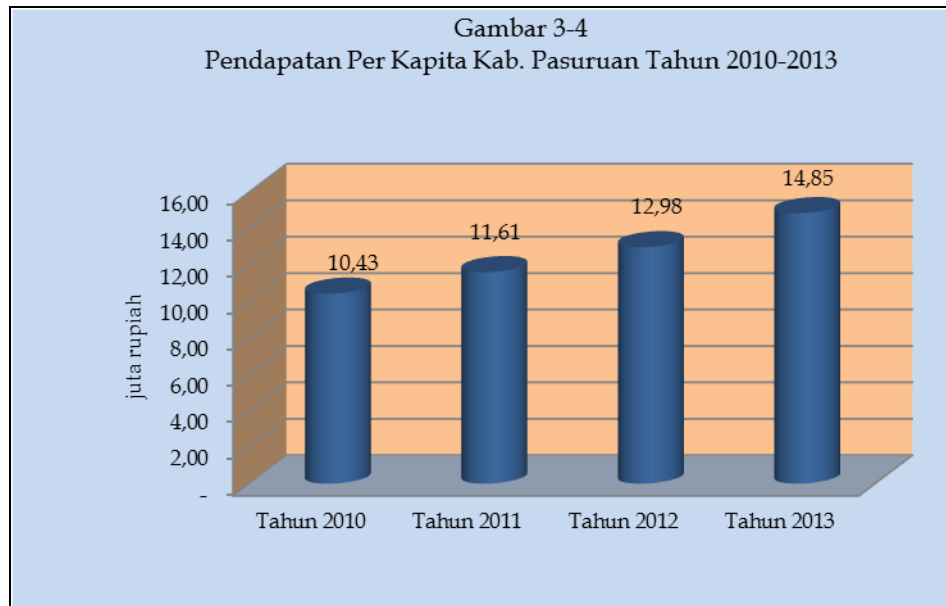
Struktur PDRB Kabupaten Pasuruan pada tahun 2013 memiliki empat pilar utama perekonomian berdasarkan tingkat kontribusi masing-masing sektor. Kontribusi terbesar pertama adalah sektor industri pengolahan sebesar 32,89%. Kedua, sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 25,04%. Ketiga, sektor perdagangan, hotel dan restoran telah menyumbangkan 19,62%. Keempat adalah sektor Jasa - jasa dengan kontribusi 9,30%. Keempat sektor tersebut dalam dua tahun terakhir secara konsisten dan pada kisaran angka persentase yang relatif sama memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Pasuruan.

3.2.3. Pendapatan per Kapita

Pendapatan perkapita dihitung berdasarkan rata-rata PDRB atas dasar harga berlaku setiap jiwa penduduk pada tahun berjalan. Angka pendapatan per kapita tidak serta-merta mencerminkan tingkat kemakmuran penduduk Kabupaten Pasuruan, namun lebih tepat diartikan sebagai gambaran tingkat kemajuan perekonomian di wilayah Kabupaten Pasuruan. Hal ini karena masih adanya unsur perubahan harga dalam komponen penghitungan PDRB perkapita.

Pendapatan perkapita Kabupaten Pasuruan tahun 2013 mencapai 14,84 juta atau ada kenaikan sebesar 14,33% dibanding tahun 2012. Data ini menunjukkan adanya peningkatan yang besar dibanding tahun-tahun sebelumnya, dimana tahun 2012 sebesar Rp.12,98 juta atau meningkat sebesar 11,89% dibandingkan tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp.11,61 juta. Perkembangan

pendapatan per kapita selama kurun waktu empat tahun terakhir sebagaimana Gambar 3-4.



Sumber data: BPS Kabupaten Pasuruan

3.3. Penduduk Kabupaten Pasuruan

Jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan sebesar tahun 2013 sebesar 1.556.700 jiwa, yang terdiri atas 769.700 jiwa laki-laki dan 787.000 jiwa perempuan (BPS Kab. Pasuruan). Jumlah ini berkembang terus pada tiga tahun terakhir, dimana pada tahun 2011 penduduk Kabupaten Pasuruan sebesar 1.520.978 jiwa terdiri dari laki-laki 753.657 jiwa dan perempuan 767.321 jiwa. Tahun 2012 naik menjadi 1.542.837 jiwa, terdiri dari laki-laki 762.653 jiwa dan perempuan jiwa 780.184 jiwa (BPS Kabupaten Pasuruan), sehingga pertumbuhan penduduk tahun 2103 hanya sebesar 0,90% yang lebih kecil dibanding tahun 2012 mencapai 1,43%.

Kondisi demografis Kabupaten Pasuruan tahun 2013, khususnya berkaitan dengan gambaran struktur penduduk berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 3-4.

Tabel 3.4
Struktur Penduduk Kabupaten Pasuruan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Damatkan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	2011		2012		2013	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Tdk Tamat SD	575.546	38,05	560.955	36,88	574.111	36,88
2	SD/Sederajat	516.373	34,14	524.371	34,48	536.750	34,48
3	SLTP/Sederajat	204.760	13,54	212.523	13,97	217.471	13,97
4	SLTA/Sederajat	168.551	11,14	172.036	11,31	191.318	12,29
5	SMK	14.843	0,98	14.953	0,98		
6	Akademi/D1/D2	5.347	0,35	5.689	0,37	37.049	2,38
7	D3	5.500	0,36	5.758	0,38		
8	D4/S1	20.421	1,35	22.999	1,51		
9	S2/S3	1.127	0,07	1.694	0,11		
Jumlah		1.512.468	100	1.520.978	100	1.556.700	100

Sumber data : BPS Kabupaten Pasuruan

Dari data pada Tabel 3-5 menunjukkan bahwa tahun 2012 strata pendidikan masyarakat Kabupaten Pasuruan sampai dengan pendidikan menengah mencapai 97,62%, sedangkan yang berlatar belakang pendidikan tinggi sebesar 2,38%. Kondisi tersebut menunjukkan peningkatan kualitas apabila dibandingkan dengan tahun 2011, yang mencatat proporsi penduduk berpendidikan tinggi sebanyak 2,14%. Tahun 2013 komposisi penduduk menurut pendidikannya terdistribusi sebagai berikut: 1) tidak belum tamat SD sebesar 36,88%; 2) SD/sedarajat sebesar 34,48%; 3) SLTP/sedarajat sebesar 13,97%; 4) SLTA/sederajat sebesar 12,29%; dan D1-S-3 sebesar 2,38%.

Penduduk Kabupaten Pasuruan menurut mata pencaharian sebagaimana pada Tabel 3-5.

Tabel 3.6
Komposisi Penduduk Kabupaten Pasuruan
Menurut Mata Pencaharian/Lapangan Usaha Sektoral

No	MATA PENCAHARI AN	2010		2011		2012	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tidak/Belum Bekerja	578.014	39,18	503.392	33,28	476.224	31,31
2	Petani	440.221	29,84	425.885	28,16	408.281	26,84
3	PNS	13.284	0,90	16.184	1,07	17.275	1,14
4	TNI/POLRI	6.974	0,47	8.844	0,58	8.894	0,58
5	Pedagang	64.204	4,35	100.247	6,68	102.811	6,76
6	Pegawai Swasta	108.539	7,36	149.089	9,86	154.928	10,19
7	Jasa - jasa	114.638	7,77	152.245	10,07	193.102	12,70
8	Lainnya	149.491	10,13	156.582	10,35	159.463	10,48
	Jumlah	1.475.365	100,00	1.512.468	100,00	1.520.978	100,00

Sumber data : BPS Kabupaten Pasuruan

Penduduk Kabupaten Pasuruan pada tahun 2010 yang tidak/belum bekerja sebesar 39,18%, mengalami perbaikan kualitas pada tahun 2012 yang turun menjadi 31,31%. Sedangkan mata pencaharian terbesar adalah sebagai petani. Sementara tahun 2013 perkembangan jumlah petani sebesar 28,16%; PNS/TN/Swasta sebesar 28,26%; tidak/belum bekerja sebesar 33,28%; dan bekerja di sektor lain sebesar 10,33% dari seluruh penduduk.

3.4. Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan

Pembangunan ketenagakerjaan diprioritaskan pada peningkatan kompetensi tenaga kerja yang produktif, terampil, mandiri, berjiwa wirausaha dan beretos kerja sehingga mampu meningkatkan pendapatan. Untuk itu pemerintah Kabupaten Pasuruan melaksanakan pembangunan di bidang ketenagakerjaan untuk menjamin setiap warga masyarakat memperoleh lapangan pekerjaan yang layak.

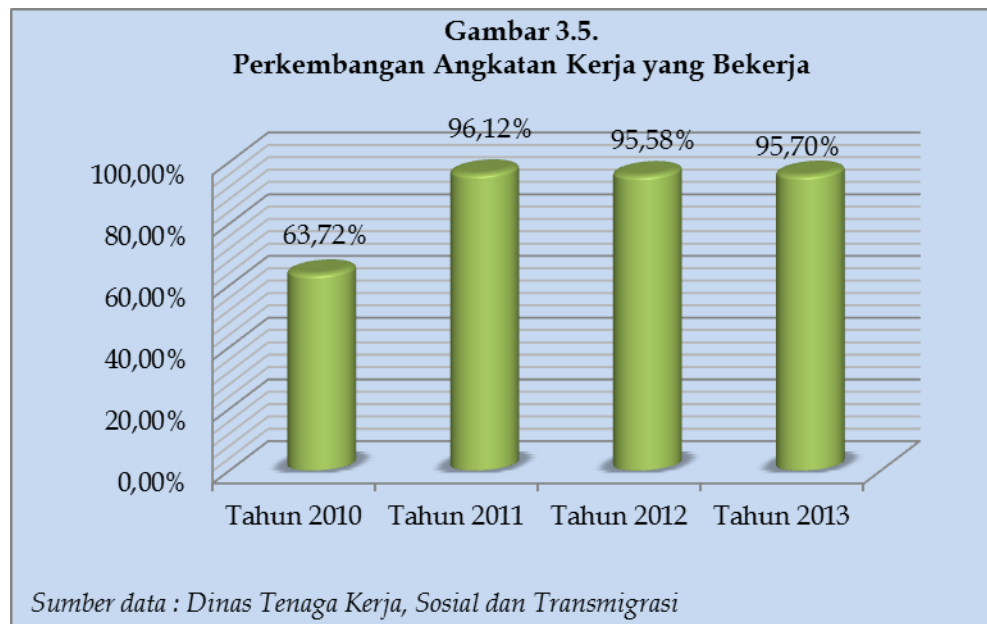
Sehubungan dengan itu, kebijakan bidang ketenagakerjaan diarahkan kepada semakin berkurangnya pengangguran dengan menciptakan kesempatan berusaha yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, penciptaan iklim usaha yang dapat menarik investasi, terkendalinya tingkat kepadatan penduduk. Sasaran yang akan dicapai adalah terciptanya peningkatan kualitas tenaga kerja serta hubungan industrial yang harmonis dan dinamis.

Perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan, dapat dilihat dari jumlah angkatan kerja dan tenaga kerja yang bekerja di Kabupaten Pasuruan dalam 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.6. dan gambar 3.5.

Tabel 3.6.
Perkembangan Angkatan Kerja Yang Bekerja tahun 2009-2012

Tahun	Angkatan Kerja (orang)	Yang Bekerja (orang)	%
2010	1.128.212	718.899	63,72
2011	882.124	847.936	96,12
2012	890.652	851.317	95.58
2013	905.668	866.716	95,70

Sumber data : Dinas tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi



Berdasarkan data pada tabel dan gambar tersebut analisis yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Rasio angkatan kerja yang bekerja

Rasio angkatan kerja yang bekerja diperoleh dengan membandingkan jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja kemudian dikalikan dengan seratus. Realisasi angkatan kerja yang bekerja tahun 2012 sebesar 851.317 orang atau 95.58% dari jumlah angkatan kerja 890.652 orang. Prosentase capaian tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan 94,97%.

Realisasi angkatan kerja yang bekerja tahun 2013 sebesar 866.716 orang atau 95,70% dari jumlah angkatan kerja 905.668 orang. Capaian tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 0,15%. Jumlah angkatan kerja yang bekerja tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 15.399 orang (1,81%) dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 851.317 orang. Hal ini disebabkan oleh masuknya investasi baru, pertumbuhan ekonomi, keadaan dunia

usaha dan perekonomian yang kondusif dan program pembangunan lainnya.

2. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran angkatan kerja di Kabupaten Pasuruan pada 4 tahun terakhir bervariasi, dimana tahun 2011 sebanyak 3,88%, kemudian pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 4,42% sebagai akibat bertambahnya angkatan kerja. Tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 4,35% (lihat tabel 3.7)

Tabel 3.7
Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran

Tahun	Angkatan Kerja (orang)	Angkatan Kerja Yang Bekerja (orang)	Pengangguran	% Pengangguran
2011	882.124	847.936	34.188	3,88%
2012	890.652	851.317	39.335	4,42%
2013	905.668	866.716	38.952	4,35%

Sumber data : Dinas tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi

3.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meliputi tiga indikator yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks paritas daya beli. Ketiganya secara satu kesatuan merupakan indikator keberhasilan pembangunan manusia. IPM Kabupaten Pasuruan tahun 2012, berdasarkan data sementara BPS Kabupaten Pasuruan, mencapai 68,54. Dengan demikian mengalami peningkatan atau menunjukkan kondisi yang lebih baik dibanding tahun 2011 yang mencapai 68,28.

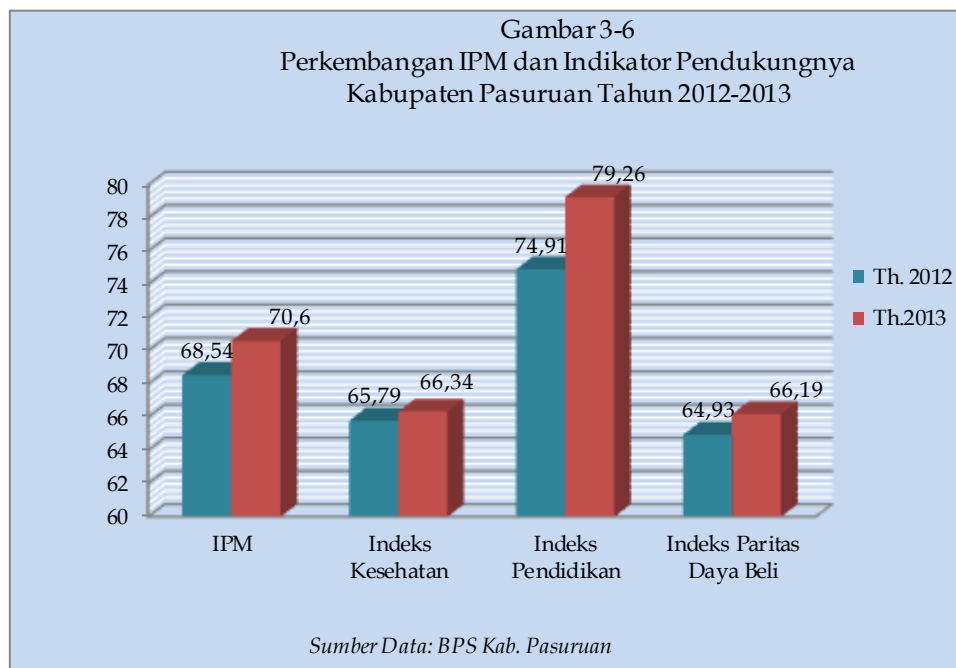
Secara rinci perkembangan IPM Kabupaten Pasuruan Tahun 2010-2013 sebagaimana pada tabel 3.8, gambar 3.6 dan gambar 3-7, masih banyak ditentukan oleh perkembangan indeks pendidikan dan indeks kesehatan, tetapi untuk indeks paritas daya beli

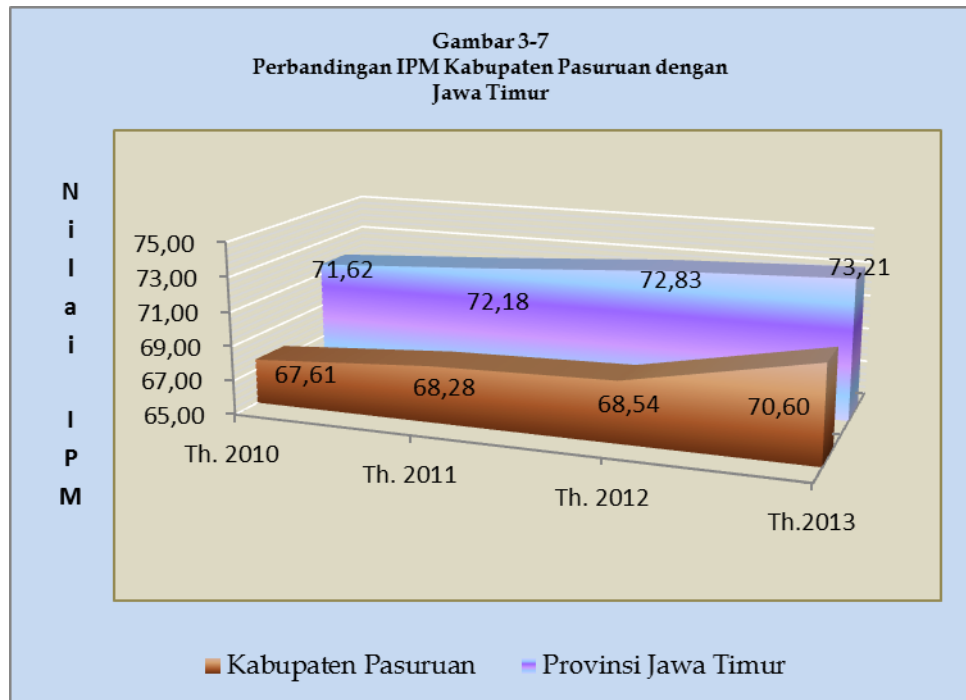
perkembangannya lebih lambat. Tahun 2010 indeks paritas daya beli sebesar 63.74% per-orang pertahun tetapi sampai dengan tahun 2013 hanya berkembang menjadi Rp55.19% per-orang pertahun.

Tabel 3-8
Perkembangan IPM Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2012

Keterangan	Th. 2010	Th. 2011	Th. 2012	Th.2013
IPM	67.61	68.28	68.54	70.60
Indeks Kesehatan	65.01	65.57	65.79	66.34
Indeks Pendidikan	74.09	74.88	74.91	79.26
Indeks Paritas Daya Beli	63.74	64.37	64.93	66.19

Sumber data: BPS Kabupaten Pasuruan





Sementara kalau dibandingkan dengan perkembangan IPM Jawa Timur, menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Pasuruan masih berada di level lebih rendah dengan rata-rata IPM Jawa Timur. (lihat gambar 4.6) Padahal kalau dilihat dari jumlah potensi yang dimiliki Kabupaten Pasuruan termasuk jumlah investasi yang berkembang di Pasuruan, maka Kabupaten ini merupakan salah satu Kabupaten yang menjadi bidikan para investor ranking ke-4 setelah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. Dengan demikian, berkembangnya investasi di Kabupaten Pasuruan belum berdampak banyak terhadap IPM-nya.

BAB IV

ANALISIS POTENSI DAERAH YANG MENDUKUNG SISTEM INOVASI DAERAH DAN MEMILIKI DAYA SAING

Potensi daerah atau dalam Penelitian ini disebut sebagai kondisi SIDa Kabupaten Pasuruan saat ini yang memiliki daya saing dapat dipilih 6 sektor, yakni: 1) sektor kebudayaan dan pariwisata, 2) sektor industri, 3) sektor pertanian tanaman pangan, 4) sektor perkebunan dan kehutanan, 5) sektor kelautan dan perikanan, dan 6) sektor peternakan dan kehewan.



Keenam sektor tersebut dapat dirinci sebagaimana berikut:

4.1. Sektor Kebudayaan dan Pariwisata

Potensi sektor kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Pasuruan terdiri dari: obyek Wisata Alam, Wisata Budaya, Wisata Agro dan Wisata Minat Khusus.

1. Wisata Alam antara lain: Gunung Bromo, Taman Candra Wilwatikta, Air Terjun Kakek Bodho, Pemandian Alam Banyubiru, Danau Ranu Grati, Sumber Air Umbulan, Air Terjun Putuk Truno, Air Terjun Coban Baung, Air Terjun Coban Jala, Air Terjun Rambut Moyo, Air Terjun Coban Waru, dan Pantai Pasir Panjang Kecamatan Lekok.
2. Wisata Budaya dan Religi antara lain: Candi Laras, Candi Satrio Manggung, Candi Kebo Ireng, Candi Gununggangsir, Candi Belahan, Candi Sepilar, Candi Makurotomo, Candi Jawi, Goa Jepang/Inna Tretes, Makam Ki Ageng Penanggungan, Makam Sakerah, Dewa Wisata Situs Purbakala Tambak Sari, Makam Mbah Bangil, Makam Mbah Ratu Ayu, Makam Mbah Semendhi, Makam Mbah Segoropuro, Pertapaan Abiyoso, dan Pertapaan Indrokilo.
3. Wisata Agro meliputi: Agrowisata Apel/Agro Krisna Kec. Tukur, Agro Bunga Krisan dan Paprika, Peternakan Sapi Perah, Agro Jamur, Agro Durian, Agro Wisata Bhakti Alam Kec. Tukur, Agro PG Kedawung, Agro Aneka Mangga, Taman Anggrek Sien Orchid, Kebun Bunga Sedap Malam, dan Kebun Raya Purwodadi.
4. Wisata Minat Khusus meliputi: Taman Safari Indonesia II, Taman Dayu, Finna Golf & Country Club, Kaliandra, Bukit Flora, dan Baung Camp.

Dengan jumlah potensi pariwisata tersebut, jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata tahun ini semakin meningkatnya dari pada tahun sebelumnya. Kondisi ini sebagai akibat dari adanya daya tarik wisata dan perkembangan kegiatan pariwisata.

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke lokasi obyek wisata tahun 2013 meningkat sebesar 115.865 (6.4%) atau sebanyak 1.926.101 wisatawan dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 1.810.236 wisatawan.

Kenaikan jumlah kunjungan wisatawan tersebut diatas dikarenakan peningkatan *brand image* dari beraneka ragam obyek wisata yang mulai dikenal oleh masyarakat luas. Namun demikian berbagai macam promosi pariwisata seperti : Promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik, pameran objek wisata, kerjasama dengan travel agent gatering; roadshow pelaku wisata dan rally wisata serta inovasi lain perlu dilakukan.

4. 2. Sektor Industri

Potensi sektor industri di Kabupaten Pasuruan terkelompokkan ke dalam Industri Kecil Menengah dan Besar (IKMB). Industri besar di Kabupaten Pasuruan terutama berlokasi di Kecamatan Gempol, Beji, Pandaan, Sukorejo, dan Rembang. Selain itu terdapat juga kawasan industri yaitu Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER), suatu kawasan berikat yang menjadikan sebagai tempat potensial untuk berinvestasi yang aman dan menjanjikan

Industri kecil menengah dan rumah tangga yang berkembang di Kabupaten Pasuruan lebih banyak di perdesaan. Variasi sentra Industri kecil menengah yang berkembang, antara

lain: industri makanan dan minuman, bordir, meubel, dan perak.

Sentra kerajinan bordir tersebar di Kecamatan Bangil yang terkenal dengan sebutan “Bangkodir” yaitu Bangil Kota Bordir, serta di wilayah lain yaitu Kecamatan Beji, Wonorejo, Rembang, dan Sukorejo. Produk kerajinan bordir disamping untuk memenuhi kebutuhan pasaran lokal juga mampu menembus pasaran ekspor (Brunei, Malaysia, Belanda dan Singapura).

Sentra kerajinan kayu (meuble), antara lain di desa Sentul Kecamatan Purwodadi, Tambaksari Kecamatan Kraton, Wonorejo Kecamatan Wonorejo, Sungikulon dan Sungiwetan Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Winongan serta Kecamatan Rejoso. Kerajinan kayu tersebut menghasilkan mainan anak-anak, setir mobil, kotak tissue, handle perseneling, dashboard, catur dan lain-lain. Selain kerajinan kayu di Wilayah Kabupaten Pasuruan juga berkembang industri meubel. Pemasaran kerajinan kayu dan meubel tersebut mencakup wilayah lokal dan luar negeri.

Kerajinan perak dihasilkan dari sentra-sentra industri kerajinan perak meliputi Kecamatan Bangil dan Gempol. Produk-produk yang dihasilkan telah menembus pasar luar negeri, antara lain Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa.

Jumlah unit IKMB di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2013 mencapai 2.177 unit atau meningkat sebanyak 75 (3,57%) unit dari tahun 2012 yang sebanyak 2.102 unit. Namun demikian kalau dibandingkan dengan capaian tahun 2012 target IKMB sebanyak 78 unit, maka jumlah IKMB tahun 2013 hanya 75 unit. Menurunnya IKMB tahun 2013 dibanding tahun 2012 diasumsikan karena belum stabilnya ekonomi global yang berpengaruh terhadap ekonomi regional.

Tabel 4-1
Perkembangan IKMB
Kabupaten Pasuruan Tahun 2012-2013

Tahun	Unit	% Peningkatan Unit	Nilai Investasi	% Peningkatan Investasi
2012	2,102		8,461,773,660,000	
2013	2,177	3.57%	8,648,770,630,000	2.21%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pasuruan diolah

Adanya penurunan jumlah unit IKM diikuti dengan nilai investasinya dimana nilai investasi tahun 2013 mencapai Rp.8.648.770.630.000,- atau naik Rp.186.996.970.000,- (2,21%) dibandingkan nilai investasi tahun 2012 yaitu sebesar Rp.8.461.773.660.000,-.

Peningkatan investasi tersebut diikuti dengan peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap, dimana tahun 2013 sebanyak 2.735 tenaga kerja yang terserap dengan investasi tersebut meningkat sebanyak 55.13% dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 1.763 tenaga kerja.

4.3. Sektor Pertanian Tanaman Pangan

Wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki potensi sektor pertanian dan perkebunan yang cukup potensial, sehingga mampu menghasilkan produk-produk tanaman pertanian yang produktif, berkualitas dan memiliki produktivitas tinggi. Diantara tanaman pertanian tanaman, dan perkebunan yang dimaksud antara lain: produksi tanaman pangan, produksi tanaman hortikultura. Dan tanaman perkebunan

1. Produksi Tanaman Pangan

1) Produksi Tanaman Padi

Produksi padi pada tahun 2013 sebesar 603.551 ton, lebih tinggi 113.661 ton atau mengalami peningkatan sebesar 22.344,39 ton atau sebesar 3,84% dibanding dengan produksi tahun 2012 yang sebesar 581.206,61 ton. Peningkatan produksi ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan luas panen padi dan ketersediaan air sebagai akibat dari tingginya curah hujan serta perubahan pola tanam dari kedelai beralih ke komoditas padi.

Tabel 4-2

Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2012 -2013

No	Komoditi	Produksi 2012 (ton)	Produkti -vitas 2012 (kw/ha)	Produksi 2013 (ton)	Produkti -vitas 2013 (kw/ha)
1	Padi	581.206,61	65,35	603.551,00	63,14
2	Jagung	196.658,31	47,17	215.836,00	48,46
3	Kedelai	24.152,08	15,53	19.290,00	16,88
4	Kacang Tanah	6.127,09	13,27	8.691,00	22,11

Sumber data: BPS Kabupaten Pasuruan

2) Produksi Tanaman Jagung

Produksi jagung tahun 2013 sebesar 215.836 ton, lebih tinggi 19.177,69 ton atau 9,75%. Bila dibandingkan dengan produksi jagung tahun 2012 yang sebesar 196.658,31 ton. Peningkatan produksi ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan luas panen dan produktivitas jagung.

3) **Produksi Tanaman Kedelai.**

Produksi kedelai tahun 2013 sebesar 19.290 ton atau menurun sebesar 4.862,08 ton atau 20,13%, dibanding dengan produksi tahun 2012 sebesar 24.152,08 ton. Penurunan produksi kedelai, disebabkan oleh adanya penurunan luas panen kedelai dimana terjadi perubahan pola tanam tanaman kedelai ke tanaman padi, karena pada tahun 2013 terdapat musim hujan yang relative panjang sampai pada bulan Juli. Sehubungan dengan itu pada bulan tersebut yang seharusnya jadwalnya menaman kedelai tetapi petani masih melakukan budidaya komoditas padi.

4) **Produksi Tanaman Kacang Tanah**

Produksi kacang tanah tahun 2013 sebesar 8.691 ton. Apabila dibandingkan dengan produksi tahun 2012 yang sebesar 6.127,09 ton, maka produksi kacang tanah tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 2.563,45 ton atau 41,83%. Peningkatan produksi ini disebabkan oleh peningkatan pola tanam yang semakin berkualitas sehingga produksi kacang tanah meningkat.

2. Produksi Hortikultura

1) **Produksi Kentang**

Produksi Kentang tahun 2013 adalah sebesar 82.547 ton, lebih besar dibandingkan dengan produksi tahun 2012 sebesar 75.906 ton atau terjadi peningkatan produksi sebesar 6.641 ton (8,75%). Bahkan lebih tinggi 41.069 ton atau 99,01% dari target yang ditetapkan sampai dengan akhir RPJMD periode tahun 2008 - 2013 sebesar 41.478 ton. Peningkatan

produksi ini disebabkan oleh adanya peningkatan luas panen yang diikuti pula dengan peningkatan produktivitas kentang dari 195 kw/ha pada tahun 2012 menjadi 196,73 kw/ha pada tahun 2013.

Peningkatan luas panen kentang disebabkan adanya pengembangan kawasan kentang yang didukung oleh anggaran APBN, sedangkan peningkatan produktivitas disebabkan adanya bantuan benih kentang bermutu yang diberikan secara kontinyu kepada kelompok tani melalui anggaran APBD.

2) Produksi Kobis

Produksi Kobis tahun 2013 adalah sebesar 72.361 ton, atau lebih besar dibandingkan dengan produksi tahun 2012 yang sebesar 63.454 ton atau terjadi peningkatan sebesar 8.907ton atau 14,04%. Bahkan lebih tinggi 30.401 ton atau 42,01% dari target yang ditetapkan sampai dengan akhir RPJMD periode tahun 2008 - 2013 sebesar 41.960 ton.

Peningkatan produksi ini disebabkan adanya peningkatan luas panen dan produktivitas. Sedangkan peningkatan luas panen disebabkan adanya

4) Produksi Durian

Produksi durian tahun 2013 adalah sebesar 84.670 ton, lebih besar jika dibandingkan dengan produksi tahun 2012 yang mencapai 84.495 ton atau terjadi peningkatan yang sebesar 175 ton atau 0,21%. Namun kalau dibandingkan dengan RPJMD periode tahun 2008 - 2013 sebesar 117.776 ton, maka produksi durian tahun 2013 terjadi penurunan 33.106 ton atau 39,10%.

Peningkatan produksi durian disebabkan adanya peningkatan luas panen. Peningkatan luas panen durian disebabkan adanya pengembangan durian berupa bantuan bibit durian varietas montong yang diberikan kepada kelompok tani melalui anggaran APBD Kabupaten. Namun demikian, bahwa secara produktivitas bahwa 2013 adanya penurunan produktivitas, sebagai akibat curah hujan yang cukup tinggi, sehingga berdampak terhadap proses pembuahan yang kurang optimal.

5) Produksi Mangga

Produksi mangga tahun 2013 adalah sebesar 182.237ton, lebih tinggi bila dibandingkan dengan produksi tahun 2012 sebesar 167.947 ton atau terjadi peningkatan sebesar 14.290 ton atau 8,51%. Bahkan produksi tahun 2013 ini tinggi 58.564 ton atau 32,14% dari target yang ditetapkan pada RPJMD periode tahun 2008 - 2013 sebesar 123.673 ton.

Peningkatan produksi mangga tersebut disebabkan adanya peningkatan luas panen dan produktivitas mangga yang didukung melalui pengembangan sentra kawasan mangga berupa bantuan bibit mangga gadung klonal 21 yang bersumber dari APBD Kabupaten.

6) Produksi Apel

Produksi Apel tahun 2013 sebesar 140.284 ton, yang sedikit lebih tinggi dari produksi tahun 2012 yang sebesar 139.210 ton atau terjadi kenaikan sebesar 1.074 ton atau 0,77%. Bahkan lebih tinggi 23.601 ton (16,82 %), yang ditargetkan akhir RPJMD periode tahun 2008 - 2013 sebesar 116.683 ton. Peningkatan produksi ini disebabkan adanya peningkatan produktivitas apel akibat bantuan pupuk 57rganic, alat

mesin pertanian dan sekolah lapang pengendalian hama terpadu pada areal pengembangan apel.

7) Produksi Bunga Krisan

Produksi Bunga Krisan tahun 2013 adalah sebesar 37.370.000 tangkai, yang mana produksi ini bila dibandingkan dengan produksi tahun 2012 yang sebesar 34.270.000 tangkai atau terdapat kenaikan sebesar 3.100.000 tangkai atau 9,05%. Kalau dibandingkan dengan target yang ditetapkan didalam RPJMD periode tahun 2008 -2013, maka produksi tahun 2013 lebih tinggi sebesar 5.782.080 (546,30%) tangkai, dari yang ditetapkan sebesar 31.587.920 tangkai.

Peningkatan produksi bunga krisan ini disebabkan adanya peningkatan luas panen dan produktivitas. Peningkatan luas panen dan produktivitas krisan disebabkan adanya pengembangan kawasan krisan yang didukung oleh anggaran APBN dan bantuan jaringan irigasi tetes secara kontinyu dan berkelanjutan kepada kelompok tani melalui anggaran APBD Kabupaten.

8) Produksi Bunga Sedap Malam

Produksi Bunga Sedap Malam tahun 2013 sebesar 59.702.450 tangkai, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan produksi tahun 2012, yakni sebesar 55.625.060 tangkai atau terjadi peningkatan sebesar 4.077.390 tangkai atau 7,33%. Bila dibanding dengan target yang ditetapkan di dalam RPJMD periode tahun 2008 - 2013 sebesar 54.278.906 tangkai, maka produksi tahun 2013 lebih tinggi 5.423.544 tangkai atau 9,08%.

Peningkatan produksi ini disebabkan oleh peningkatan produktivitas melalui penggunaan varietas unggul yang

sudah beradaptasi dengan lingkungan sehingga pertumbuhan tanaman lebih optimal.

9) **Produksi Bunga Anggrek**

Produksi Bunga Anggrek tahun 2013 sebesar 104.156 tangkai, lebih rendah bila dibandingkan dengan produksi tahun 2012 yang sebesar 314.961 tangkai atau terjadi penurunan sebesar 210.805 tangkai atau 66,93%. Bahkan kalau dibandingkan dengan target di RPJMD periode tahun 2008 - 2013 sebesar 395.754 tangkai, maka produksi Bunga Anggrek tahun 2013 lebih rendah sebesar 291.598 tangkai atau 279,96% dari target yang ditetapkan.

Penurunan produksi ini disebabkan adanya penurunan luas panen dan produktivitas tanaman anggrek, sebagai akibat dari sebagian besar petani anggrek beralih menanam tanaman hias lainnya yang lebih efisien dalam pemeliharaannya dan mempunyai nilai ekonomis lebih menjanjikan, sedangkan anggrek membutuhkan waktu yang cukup lama dalam berproduksi serta biaya pemeliharaan cukup besar.

4.4. Sektor Produksi Tanaman Perkebunan

Pada tahun 2013, produksi tanaman perkebunan yang dihasilkan mencapai 43.007,14 ton. Produksi tanaman perkebunan tahun 2013 bila dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 44.564,77 ton, maka produksi tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 1.557,63 ton atau 3,62 %. Penurunan produksi perkebunan dipengaruhi oleh anomali iklim yaitu curah hujan tinggi selama tahun 2013 yang berdampak pada rendemen produksi tanaman tebu. Namun demikian secara total komoditi perkebunan telah

melampaui target RPJMD 40.896 ton. Kenaikan ini terjadi karena implementasi dari program peningkatan produksi pertanian dan perkebunan dilaksanakan secara optimal dan aplikasi alih teknologi.

Diskripsi produksi tanaman perkebunan yang menjadi andalan terdapat 7 tanaman yang dapat terus dikembangkan adalah: tanaman tebu, kapuk randu, kunyit, jahe, temulawak dan kelapa sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4-3
Produksi Tanaman Perkebunan

No	Komoditas	2010	2011	2012	2013
1	Tebu	17.031,65	18.786,17	25.600,90	24.048,65
2	Kapuk Randu	4.492,00	4.490,00	4.488,25	4.483,85
3	Kunyit	3.317,00	3.317,26	3.317,30	3.317,32
4	Jahe	3,189,00	3.189,34	3.189,40	3.189,41
5	Temulawak	2.923,00	2.923,32	2.923,35	2.923,37
6	Kelapa	2.622,00	2.622,25	2.622,75	2.622,82
7	Kopi	1.090,00	1.092,00	1.176,70	1.176,90
8	Kenanga	654,00	656,00	656,25	656,35
9	Cengkeh	270,00	271,00	301,60	301,70
10	Jambu Mete	288,00	288,27	288,27	286,77

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Pasuruan

1) Produksi Tanaman Tebu (Mitra Perusahaan)

Upaya peningkatan dan pengembangan produksi tanaman tebu rakyat dilakukan oleh petani dengan pihak Pabrik Gula sebagai mitranya. Kemitraan ini terkait aspek teknis penanaman dan pengolahan tebu petani menjadi kristal gula.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan berperan sebagai penanggung jawab program dan fasilitator kemitraan antara pabrik gula dengan petani.

Produksi tebu tahun 2013 mencapai 24.048,65 ton, lebih

rendah 1.552,25 ton atau 6,45% bila dibandingkan dengan produksi tahun 2012. Demikian pula produksi gula tahun 2013 yang dihasilkan belum memenuhi target yang ditentukan sebesar 24.530 ton. Hal ini disebabkan rendemen produksi tebu tidak optimal karena pengaruh musim hujan dengan intensitas tinggi.

2) Produksi Kapuk Randu

Tahun 2013 Produksi tanaman Kapuk Randu sebesar 4.483,85 ton, lebih rendah 4,4 ton atau 0,09% dari tahun 2012 sebesar 4.488,25 ton. Demikian juga produksi tanaman Kapuk Randu belum memenuhi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 4.520 ton. Belum tercapainya target produksi ini disebabkan oleh meningkatnya penebangan tanaman kapuk randu untuk bahan bangunan. Namun demikian pada tahun 2013 sudah dilakukan upaya penanaman kembali dengan jenis unggul.

3) Produksi Kunyit

Produksi kunyit tahun 2013 produksi kunyit sebesar 3.317,32 ton mengalami peningkatan 0,02 ton atau 0,001 % dari produksi tahun 2012 yaitu sebesar 3.317,30 ton. Produksi kunyit tahun 2013 di atas target RPJMD sebesar 2.562 ton. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh adanya permintaan pasar yang mendorong petani meningkatkan budidaya kunyit secara swadaya dan intensif.

4) Produksi Jahe

Produksi jahe tahun 2013 sebesar 3.189,41 ton, mengalami peningkatan 0,01 ton dari produksi tahun 2012. Besaran produksi ini lebih tinggi dibandingkan target 2013 sebesar 2.827 ton. Kondisi demikian merupakan indikator bahwa

petani secara teknis mau dan mampu untuk berbudidaya tanaman jahe secara swadaya.

5) Produksi Temulawak

Produksi temulawak tahun 2013 mencapai 2.923,37 ton, mengalami peningkatan 0,02% dari produksi tahun 2012 sebesar 2.923,35 ton. Target yang ditentukan pada tahun 2013 sebesar 1557 ton, dengan demikian target produksi temulawak sudah tercapai. Peningkatan produksi sebesar 0,001% tersebut dipengaruhi animo petani berbudidaya tanaman temulawak meningkat karena nilai ekonominya cukup menjanjikan.

6) Produksi Tanaman Kelapa

Produksi tanaman Kelapa Tahun 2013 mencapai 2.622,82 ton lebih tinggi 0,07 ton atau 0,003 % dari produksi kelapa tahun 2012 sebesar 2.622,75 ton. Produksi kelapa tahun 2013 belum memenuhi target yaitu sebesar 2.640 ton. Belum tercapainya produksi kelapa disebabkan belum optimalnya kegiatan pemeliharaan tanaman kelapa milik rakyat.

7) Produksi Kopi

Produksi tanaman kopi tahun 2013 sebesar 1.176,90 ton lebih tinggi 0,20 ton atau 0,017 % dari tahun 2012 yaitu sebesar 1.176,70 ton. Jika dibandingkan dengan target produksi kopi tahun 2013 , maka produksi kopi tahun 2013 melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 1.010 ton atau sebesar 166,9 ton (16,52 %).

Kenaikan produksi kopi ini, dipengaruhi oleh intensifikasi budidaya yang dilakukan masyarakat baik melalui program maupun swadaya masyarakat.

4.5. Sektor Kelautan dan Perikanan

Pengembangan potensi komoditas kelautan dan perikanan di Kabupaten Pasuruan dilaksanakan dengan beberapa upaya dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi kelautan dan perikanan yang terdiri dari:
 - 1) Peningkatan hasil perikanan budidaya;
 - 2) Peningkatan hasil perikanan tangkap; dan
 - 3) Hasil perbenihan dari Balai Benih Ikan (BBI)
2. Penanganan serangan hama dan penyakit ikan yang berhasil ditangani; dan
3. Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya perikanan dan kelautan

Diskripsi pengembangan sektor kelautan dan perikanan baik produksi maupun produktivitasnya pada tahun 2013 dijelaskan sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi perikanan dan kelautan yang terdiri dari:
 - 1) Peningkatan hasil perikanan budidaya.

Produksi perikanan budidaya tahun 2013 mencapai 14.124,96 ton. Hasil produksi perikanan budidaya tahun 2013 jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 7.972,42 ton atau lebih tinggi sebesar 955,17 ton atau 7,25%. Produksi perikanan budidaya mampu memberikan kontribusi sebesar 64,40% dari total produksi hasil kelautan dan perikanan budidaya dan tangkap tahun 2013.

Tercapainya peningkatan produksi perikanan budidaya tahun 2013 ini disebabkan adanya upaya pengembangan

program - program ekstensifikasi budidaya air tawar, intensifikasi dan diversifikasi usaha perikanan air tawar dan air payau di beberapa wilayah kecamatan yang potensial serta prospek pasar terhadap hasil perikanan budidaya yang lebih menjanjikan sehingga respon petani cukup besar di dalam meningkatkan hasil budidaya perikanan. Disamping itu terdapat pula peningkatan sarana prasarana perikanan budidaya antara lain bangsal pembenihan ikan, jalan produksi, normalisasi saluran tambak dan jembatan, serta pintu air yang merupakan faktor pendukung terhadap peningkatan produksi perikanan budidaya.

2) Peningkatan hasil perikanan tangkap.

Produksi perikanan tangkap tahun 2013 mencapai 7.807,64 ton. Jika dibandingkan dengan realisasi produksi perikanan tangkap tahun 2012 yang mencapai 7.966,09 ton terjadi penurunan hasil produksi sebesar 158,45 ton atau 1,98%.

Penurunan produksi perikanan tangkap tahun 2013 ini dikarenakan adanya penurunan sumberdaya kelautan dan perikanan serta adanya anomali cuaca yang berpengaruh secara langsung terhadap kuantitas penangkapan ikan di laut. Produksi perikanan tangkap mampu memberikan kontribusi terhadap total produksi perikanan dan kelautan sebesar 35,60%.

3) Hasil perbenihan dari Balai Benih Ikan (BBI)

Balai Benih Ikan (BBI) adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Kegiatan perbenihan

yang diproduksi oleh BBI berupa benih ikan sebesar 6.080.000 ekor pada tahun 2013. Produksi benih ikan tahun 2013, jika dibandingkan dengan realisasi 2012 sebanyak 5.786.000 ekor mengalami kenaikan sebesar 294.000 ekor atau 5,08%.

2. Penanganan serangan hama dan penyakit ikan yang berhasil ditangani.

Pengukuran kinerja penanganan serangan hama dan penyakit ikan yang berhasil didasarkan pada jumlah kejadian yang berhasil ditangani dibandingkan dengan jumlah kasus serangan hama penyakit ikan yang terjadi.

Jumlah kasus serangan hama dan penyakit ikan yang berhasil ditangani pada usaha budidaya ikan air tawar Tahun 2013 sebanyak 7 kejadian dari 9 kejadian yang ada atau 77,78% kejadian yang berhasil ditangani. Dengan demikian, kinerja penanganan serangan hama dan penyakit ikan tahun 2013 sebesar 108,90 % lebih tinggi dari capaian tahun 2012 sebesar 71,43 % atau dari 7 kejadian yang berhasil ditangani 5 kejadian, sehingga keberhasilan penanganan kasus serangan hama penyakit ikan khususnya pada usaha budidaya ikan tawar tahun 2013 meningkat.

3. Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya perikanan dan kelautan

Kinerja rehabilitasi dan konservasi sumberdaya perikanan dan kelautan diukur dengan prosentase luas areal yang berhasil direhabilitasi, dibandingkan dengan luas areal yang perlu direhabilitasi.

Realisasi luas areal yang berhasil direhabilitasi pada tahun 2013 adalah seluas 55.030 m² atau 13,40% dari luas areal

yang perlu direhabilitasi yaitu 410.734 m², atau capaian indikatornya sebesar 103,31%. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2012 sebesar 12,84%, maka capaian kinerja tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 4,36%. Capaian ini juga lebih tinggi dari target yang ditetapkan sampai dengan akhir RPJMD periode tahun 2008 - 2013 yaitu sebesar 12,97%.

4.6. Sektor Peternakan dan Kehewan

Pengembangan potensi sektor peternakan dan kehewan di Kabupaten Pasuruan dilaksanakan dan diarahkan untuk: 1) peningkatan produksi peternakan, dan 2) peningkatan populasi ternak.

1. Peningkatan Produksi Peternakan

Peningkatan produksi peternakan, bertujuan untuk mengetahui perkembangan tingkat produksi peternakan yang meliputi daging, telur dan susu.

1) Produksi Daging

Produksi daging Tahun 2013 sebesar 22.209,09 ton, atau produksi daging lebih tinggi 441,71 ton atau 2,02 % dari tahun 2012. Produksi daging tahun 2013 telah memenuhi target yang ditetapkan RPJMD tahun 2008-2013 yaitu sebesar 20.272,70 atau tercapai 109,55%. Peningkatan produksi daging disebabkan karena meningkatnya jumlah pemotongan ternak besar untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal.

2) Produksi Telur

Produksi telur tahun 2013 sebesar 13.377,23 ton, produksi ini lebih rendah 157,64 ton atau 1,14% dari target yang

ditetapkan sebesar 13.534,87 ton. Apabila produksi telur dibanding dengan tahun 2012 yang nilai produksinya sebesar 13.007,73 ton, maka produksi telur tahun 2013 telah mengalami peningkatan sebanyak 369,5 ton atau 2,84%.

Peningkatan produksi telur disebabkan karena terdapat peningkatan populasi ayam petelur. Namun seiring dengan kenaikan produksi tahun 2013 tidak diikuti oleh pencapaian target, siklus pemeliharaan memasuki masa ayam dara sehingga produksi belum maksimal.

3) Produksi Susu

Produksi susu tahun 2013 sebesar 96.970,38 ton atau mengalami penurunan 1.992,91 ton atau 2,01% apabila dibandingkan produksi tahun 2012 sebesar 98.963,29 ton. Namun demikian, produksi susu tahun 2013 telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 78.167,07 ton, atau tingkat capaiannya sebesar 18.803,31 ton (124,05%).

Penurunan produksi susu dicapai karena adanya penurunan populasi sapi perah dibandingkan populasi tahun 2012 yang disebabkan banyaknya sapi yang dikirim keluar daerah dan banyak juga sapi yang dipotong untuk memenuhi permintaan daging sapi.

Analisis terhadap capaian kinerja produksi peternakan khususnya produksi daging, susu dan telur secara keseluruhan mempunyai kecenderungan meningkat, namun untuk produksi telur secara implisit belum mencapai target. Kenaikan produksi pada daging, susu dan telur, diantara factor yang menjadi perhatian dalam peningkatan produksi peternakan adalah adanya kecenderungan peningkatan

populasi ternak dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi protein hewani.

2. Peningkatan Populasi Ternak

Peningkatan populasi ternak merupakan salah satu tugas dari Dinas Peternakan dan Kehewanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan stakeholder terhadap kebutuhan produksi peternakan dan kehewanan. Populasi ternak yang dimaksud, meliputi populasi ternak: sapi potong, sapi perah, kambing dan domba dan populasi ternak unggas: ayam petelur, ayam pedaging, itik.

1) Populasi sapi potong

Populasi sapi potong tahun 2013 sebanyak 92.174 ekor. Jumlah ini lebih rendah 22.405 ekor atau 19,55 % jika dibandingkan populasi tahun 2012 sebesar 114.579 ekor. Namun demikian, kendati terjadi penurunan populasi sapi potong, tetapi jumlah yang dicapai masih melebihi target yang ditetapkan, yakni sebesar 86.573 ekor.

Penurunan populasi ternak sapi potong 2013, disebabkan karena banyaknya perpindahan ternaksapi potong ke wilayah lain.

2) Populasi sapi perah

Populasi sapi perah tahun 2013 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan populasi sapi perah tahun 2012. Populasi sapi perah tahun 2013 sebesar 78.519 ekor sedang tahun 2012 sebesar 101,054 ekor, atau ada penurunan sebesar 22.535 ekor (22,22%). Namun demikian, penurunan populasi ini masih lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 73.886 ekor. Penurunan populasi sapi perah disebabkan

pengeluaran sapi perah keluar daerah dan dipotong untuk memenuhi kebutuhan daging.

3) Populasi kambing

Populasi kambing tahun 2013 sebanyak 67.854 ekor. Jumlah populasi tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 1.130 ekor atau 1,69% bila dibandingkan dengan jumlah populasi tahun 2012. Bahkan kenaikan populasi tersebut, sudah mencapai target yang ditetapkan, yakni sebesar 66.774 ekor.

Upaya untuk meningkatkan populasi kambing sudah cukup optimal namun tetap perlu diupayakan agar lebih maksimal lagi.

4) Populasi domba

Populasi domba tahun 2013 sebanyak 60.363 ekor. Jumlah ini lebih rendah 373 ekor atau 6,10% dibanding dengan jumlah populasi tahun 2012 sebesar 60.736 ekor. Besaran populasi domba tahun 2013 juga belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 60.736 ekor. Penurunan populasi domba ini karena adanya aktifitas pemotongan domba relatif meningkat.

5) Populasi Ayam petelur

Jumlah ayam petelur tahun 2013 sebanyak 1.201.781 ekor. Jumlah populasi ayam petelur tahun 2013 telah mengalami peningkatan sebanyak 5.000 ekor atau 4,10%, bila dibandingkan dengan populasi ayam petelur tahun 2012, yakni sebanyak 1.196.781 ekor. Namun demikian kenaikan ayam petelur belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebanyak 1.247.137 ekor.

Peningkatan populasi ayam petelur ini disebabkan karena adanya peningkatan usaha ayam petelur yang dianggap mempunyai prospek bisnis.

6) Populasi Ayam pedaging

Populasi ayam pedaging tahun 2013 sebanyak 1.927.207 ekor. Kenaikan populasi ayam pedaging tidak jauh berbeda dengan kenaikan tahun 2012. Pada tahun 2013 populasi ayam pedaging sebanyak 1.927.207 ekor, sedang populasi tahun 2012 sebanyak 1.876.103 ekor, atau lebih tinggi 51.104 ekor atau 2,72%.

Upaya tahun depan dalam upaya untuk meningkatkan populasi ayam pedaging adalah perlu dibangun sinergi secara optimal pola kemitraan ayam pedaging antara perusahaan dengan peternak secara berkesinambungan.

7) Populasi itik

Jumlah populasi itik tahun 2013 sebanyak 98.179 ekor, lebih tinggi 37 ekor atau 100,03% dari target yang ditetapkan sebesar 98,142 ekor. Demikian juga populasi itik tahun 2013 telah melebihi jumlah populasi itik tahun 2012 sebesar 2.000 ekor atau 2,07 % .

BAB V

ANALISIS KEBIJAKAN YANG MENJADI DASAR SISTEM INOVASI DAERAH

Sejumlah kebijakan yang menjadi rujukan dalam rangka perumusan arah kebijakan dan strategi SIDA Kabupaten Pasuruan terkait dengan peraturan perundangan baik yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat dirumuskan sebagai berikut:

5.1. Daya Saing dan Sistem Inovasi dalam Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2014

Tema utama dalam Rencana Kegiatan dan Pembangunan (RKP) Nasional tahun 2014 adalah *“Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan”*.

Unsur-unsur pokok dalam tema RKP 2014 tersebut, meliputi 3 unsur sebagai berikut.

1. Pemantapan Perekonomian Nasional;
 - 1) Peningkatan daya saing;
 - 2) Peningkatan ketahanan ekonomi;
 - 3) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
2. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan;
 - 1) Pembangunan SDM;
 - 2) Penurunan kemiskinan dan pengangguran;
 - 3) Mitigasi bencana;
 - 4) Peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya.

3. Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik.

- 1) Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi;
- 2) Memantapkan penegakan hukum, pertahanan, dan pelaksanaan Pemilu 2014.

Gambar 5.1

Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP 2014 sesuai dengan RPJM Nasional



Sumber: Bappenas, 2013

Memahami tema RKP Nasional 2014 tersebut nampak bahwa prioritas pembangunan ekonomi ditujukan pada pemantapan perekonomian Nasional yang mengedepankan “**peningkatan daya saing**”. Peningkatan daya saing dalam pembangunan ekonomi nasional sebagaimana dimaksudkan hanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kemandirian dan pemajuan peradaban bangsa. Daya saing dapat diimplementasikan sesuai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat manakala didukung oleh kohesi sosial.

Sehubungan dengan peningkatan Daya Saing Nasional, dan Sistem Inovasi Nasional (SINAS) pemerintah telah menegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, bahwa: dalam rangka memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi dapat berdaya saing global diperlukan adanya dukungan penguatan SISTEM INOVASI, yakni melalui pengembangan IPTEK yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemanfaatan IPTEK Nasional dalam rangka mendukung daya saing secara global.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, juga telah ditetapkan bahwa tujuan pengembangan Sisnas P3Iptek adalah untuk :

- 1) Memperkuat daya dukung iptek untuk mempercepat pencapaian tujuan negara;
- 2) Meningkatkan daya saing;
- 3) Meningkatkan kemandirian.

Pada bagian Penjelasan diungkapkan antara lain pokok pemikiran bahwa esensi pembangunan Sisnas P3Iptek berikut :

- 1) Peningkatan pencerdasan bangsa dan kehidupan masyarakat
- 2) Mengembangkan perekonomian negara
- 3) Meningkatkan dan menyetarakan sosial budaya bangsa
- 4) Memperkuat pertahanan negara.

Sementara itu pengembangan SINAS tidak bisa lepas keterkaitannya dengan SIDA. Karenanya SIDA merupakan salah satu pilar penting bagi Daya Saing Nasional. Pada UU No. 32/2004 ditegaskan bahwa:

- 1) Tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah (Pasal 2, Ayat 3); dan

- 2) Kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban antara lain: memajukan dan mengembangkan daya saing daerah (Pasal 27, Ayat 1, butir g).

5.2. Daya Saing dan Sistem Inovasi Daerah dalam Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Timur 2014

Dalam mendukung pencapaian RKP Tahun 2014, maka beberapa isu strategis pemerintah daerah antara lain:

- 1) Penyelesaian Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana SKPD;
- 2) Optimalikan Program Pembangunan Pro-Rakyat, Keadilan untuk Semua, Dan MDG's Melanjutkan Inpres Nomor 3 Tahun 2010;
- 3) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 4) Tingkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- 5) Penanganan Stabilitas Politik Dalam Negeri;
- 6) Penegasan Batas Antar Daerah;
- 7) Dukungan Terhadap Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan;
- 8) Tingkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- 9) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Sejalan dengan tema pembangunan pemerintah pusat, kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 adalah *"Memantapkan Stabilitas dan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing Global untuk Kemakmuran Rakyat Jawa Timur yang Lebih Baik"* yang dijabarkan ke dalam unsur pokok tema yaitu:

- 1) Stabilitas Daerah
 - a. Harmonisasi horizontal dan vertikal
 - b. Keamanan, ketentraman dan ketertiban
 - c. Dinamika politik yang kondusif

- d. Reformasi Birokrasi (administrasi) yang efisien, efektif dan Pemberantasan Korupsi
 - e. Pembangunan Sumber Daya Manusia
- 2) Pemantapan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing Global
- a. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif
 - b. Peningkatan daya saing global daerah
 - c. Perluasan Jaringan Internasional untuk pariwisata, perdagangan dan investasi (Tourism, Trade and Investment)
 - d. Perkuatan pasar domestik
 - e. Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk investasi
 - f. Fokus Target Group pada UMKM dan Koperasi
- 3) Peningkatan Kemakmuran Rakyat
- a. Percepatan Penurunan Kemiskinan
 - b. Percepatan Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka
 - c. Percepatan Peningkatan IPM
 - d. Pelestarian lingkungan yang berkelanjutan
 - e. Pengurangan Disparitas antar Wilayah dan Kelompok Pendapatan
 - f. Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk pelayanan dasar

Mengacu RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014 terutama pada 9 (sembilan) agenda pembangunan Jawa Timur dan memperhatikan target kinerja agregat, maka isu dan program strategis RKPD Tahun 2014 adalah sebagai berikut.

NO	ISU STRATEGIS	TUJUAN	USULAN KEGIATAN STRATEGIS
1	Pembangunan Kawasan Jawa Timur Bagian Utara	Mendukung penguatan pusat pertumbuhan di pulau Jawa sesuai dengan MP3EI, dan diarahkan untuk mendukung pembangunan wilayah Jawa Timur sebagai pusat pertumbuhan yang menjadi orientasi, pasar, dan rujukan pembangunan wilayah Indonesia Timur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan prasarana jalan: tol Gresik-Tuban, tol Legundi-Bunder, simpang susun ke terminal uhan Tel Lamong 2. Pembangunan prasarana kereta api double track Surabaya-Bojonegoro, rel menuju Tel Lamong, Tj Perak-Kalimas 3. Pembangunan prasarana perhubungan laut: pelebaran alur pelayanan barat Sby, trestledermaga laut Tj tembaga Probolinggo
2	Pembangunan Kawasan Jawa Timur bagian Selatan	Mendukung pembangunanpusat-pusat pertumbuhanekonomi wilayah JawaTimur bagian Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian jalur lintasselatan 2. Pembangunan prasarana perhubungan udara: fasilitas operasionalAbdurrahman Saleh Malang 3. Pembangunan bandara baru di Kertosono atau daerah sekitarnya sebagai back-up bandara di Malang 4. Pembangunan prasarana penahan gelombang laut di Banyuwangi 5. Pengembangan pelabuhan barang di Pacitan
2	Percepatan pengembangan wilayah Suramadu	Mendukung pengembangan wilayah Suramadu sebagai Pusat Pengembangan Perekonomian Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan prasarana jalan lintas utara Madura, lintas utara-selatan Madura, lintas selatan Madura, perluasan tol jembatan suramadu-pelabuhan terminal 2. Prasarana perhubungan: pelabuhan peti kemas Socah Madura, pelabuhan regional di Sampang, prasarana u/ pulau-pulau kecil, pengembangan bandara Trunojoyo 3. Pembangunan prasarana air minum dan air baku 4. Pembangunan tenaga listrik tambah suplai PLN, prasarana listrik di pulau-pulau kecil

5.3. Daya Saing dan Sistem Inovasi Daerah dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 - 2025

Tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2014 sebagaimana Permendagri 54 Tahun 2010 maupun Permendagri 23 Tahun 2013 disusun sebagai penjabaran dari RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 - 2025 yang memuat dalam **Visi Pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2005 - 2025** adalah *“Kabupaten Pasuruan yang Agamis, Berdaya Saing, Mandiri dan Sejahtera”*

Tujuan Jangka Panjang tahun 2005-2025 Kabupaten Pasuruan adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, selaras dengan tujuan jangka panjang nasional. Sejahtera, adil dan makmur ini di dalamnya menggambarkan pemerataan pembangunan di seluruh Kabupaten Pasuruan, karena kondisi saat ini di Kabupaten Pasuruan terdapat ketimpangan pembangunan antara Wilayah Barat dan Timur. Dari pernyataan tujuan dan dengan rumusan Visi dan Misi, maka arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 dapat diarahkan pada sasaran-sasaran sebagai berikut :

Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasuruan tahun 2005 - 2025 adalah :

1. Terwujudnya Masyarakat yang Bermoral, Beretika dan Berbudaya
 - a. Terwujudnya karakter warga Kabupaten Pasuruan yang tangguh, kompetitif dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan watak dan perilaku masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, dinamis dan

terbuka kepada perubahan

- b. Makin kokohnya budaya masyarakat yang tercermin pada peningkatan martabat, kepribadian, dan jati diri.
2. Terwujudnya Pemerintahan Kabupaten Pasuruan yang Baik dan Bersih serta Demokratis Berlandaskan Hukum
 3. Terwujudnya Daya Saing Masyarakat untuk Mencapai Kemandirian dan Kesejahteraan
 - a. Kualitas SDM yang terus meningkat dengan ditandai oleh meningkatnya nilai IPM dan pertumbuhan penduduk yang seimbang.
 - 1) Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan
 - 2) Peningkatan kualitas nutrisi masyarakat sehingga usia harapan hidup (life expectancy) masyarakat meningkat
 - 3) Mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk sehingga terjadi keseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan daya dukung ekonomi daerah
 - b. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, sehingga PDRB per kapita mencapai di atas US\$ 7,500.
 - c. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh dengan basis keunggulan kompetitif pada sektor-sektor ekonominya.
 - 1) Revitalisasi Pertanian
 - 2) Peningkatan Investasi dan Perdagangan
 - 3) Peningkatan Daya Saing Pariwisata
 - 4) Peningkatan Daya Saing Industri

- d. Terwujudnya jaringan infrastruktur transportasi dan ekonomi yang handal dan terintegrasi
 - e. Terwujudnya pasokan energi listrik dan air bersih baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri.
 - f. Terwujudnya sistem informasi berbasis elektronik yang mampu mendorong produktivitas.
 - g. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dalam kerangka
 - h. *Good and clean governance* yang mendukung akselerasi pembangunan daerah
4. Terwujudnya Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan
- a. Tingkat pembangunan semakin merata diseluruh kecamatan dan desa dengan diikuti oleh peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan, termasuk di dalamnya berkurangnya kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Pasuruan.
 - b. Kemandirian pangan dapat diwujudkan, kualitas gizi terus meningkat serta tersedianya instrumen jaminan pangan bagi setiap rumah tangga.
 - c. Terpenuhinya kebutuhan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya yang didukung oleh system pembiayaan yang berkelanjutan, efisien dan akuntabel.
5. Terwujudnya Kabupaten Pasuruan yang Asri dan Lestari (Berkelanjutan).
- RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 ini berada pada Periode Lima Tahun ke Dua (2010-2015) RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005 - 20025, dimana arah pembangunan jangka

panjang lima tahun ke dua ini mengarah pada sasaran-sasaran “Terwujudnya Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan”.

5.4. Daya Saing dan Sistem Inovasi Daerah dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018

Memperhatikan dan mengacu pada tema RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Timur serta RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 - 2025 serta mempertimbangkan eksistensi kondisi dan potensi daerah Kabupaten Pasuruan, memperhatikan hasil evaluasi, isu strategis, rancangan kerangka ekonomi kerangka pendanaan serta dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan, maka telah ditetapkan tema pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2014 adalah “*Pemantapan Pembangunan melalui Optimalisasi Potensi Daerah Menuju Kesejahteraan Rakyat yang Lebih Merata dan Berkeadilan*”.

Dengan mengacu pada dokumen perencanaan tersebut di atas maka visi, misi, dan arah pembangunan Kabupaten Pasuruan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan 2013 -2018 adalah sebagai berikut:

1. VISI

“MENUJU KABUPATEN PASURUAN YANG SEJAHTERA DAN MASLAHAT” (Maju, Aman, Sehat lahir-batin, Adil dan bermartabat)

2. MISI

- 1) **Misi 2** : Mewujudkan **sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan berdaya saing** melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis sekolah formal dan pondok pesantren.

- 2) **Misi 4** : Mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui revitalisasi pasar desa dan **peningkatan produktifitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan**
- 3) Pada BAB II, sub-bab 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

- a. Aspek daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

- b. Aspek daya saing daerah terdiri dari Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah, Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur dan Fokus Sumber Daya Manusia.

Merujuk pada visi dan misi tersebut terdapat 6 (enam) Prioritas Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2014. Selain itu arah prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan juga berasal dari penelaahan pokok - pokok pikiran DPRD, sebagai wujud perencanaan pembangunan melalui pendekatan politik yang telah dilakukan DPRD dalam kegiatan Reses DPRD, juga masukan-masukan yang diperoleh DPRD pada saat konsultasi ke Pemerintah Pusat, kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur serta rapat kerja/ rapat dengar pendapat dengan para stakeholder. Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka pokok-pokok pikiran pada RKPD Tahun 2014 adalah :

- 1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembudayaan masyarakat.
- 2) Peningkatan mutu dan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan pelayanan kesehatan

- 3) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana jalan untuk meningkatkan kelancaran transportasi perekonomian di daerah pedesaan.
- 4) Peningkatan sarana promosi investasi dan pemetaan kawasan investasi
- 5) Optimalisasi pemanfaatan Badan Latihan Kerja (BLK) sebagai upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
- 6) Peningkatan profesionalisme aparat Pemerintah baik pemerintah Kabupaten, Kecamatan, kelurahan / desa.
- 7) Optimalisasi asset Kabupaten Pasuruan mulai dari penataan, penertiban dan pemanfaatannya.

Penelaahan pokok-pokok pikiran tersebut dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan-kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah, yang ternyata memiliki keterhubungan satu sama lain dengan ke enam prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 serta RPJPD Kabupaten Pasuruan tahun 2005 - 2024, RKPD Provinsi Jawa Timur dan RKP.

Prioritas Pembangunan RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 - 2025 serta Prioritas RKPD Kabupaten pasuruan Tahun 2014 tertuang pada tabel berikut ini :

1. Keenam prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2014 selanjutnya dapat dijabarkan sebagai berikut:
Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan

- 1) Pendidikan :

- a. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua, terutama masyarakat miskin;
 - b. Peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - c. Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun termasuk kurikulum 2013;
 - d. Peningkatan akses pendidikan menengah yang berkualitas dan selaras dengan kebutuhan pembangunan
 - e. Peningkatan Angka Melek Huruf melalui pemberantasan buta aksara.
 - f. Peningkatan kualitas pendidikan dengan cara peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan yang bermuara pada peningkatan kualitas kelembagaan, SDM, sarana dan prasarana kualitas pembelajaran;
 - g. Meningkatkan kompetensi pendidikan kejuruan dan pendidikan non formal untuk meningkatkan kualitas lulusan dalam rangka memasuki dunia kerja (market friendly);
 - h. Peningkatan akses pendidikan formal, yang terjangkau.
 - i. Peningkatan prestasi pemuda dalam pembangunan
- 2) Kesehatan
- a. Mendorong pencapaian target-target MDG's antara lain penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), penurunan prevalensi kekurangan gizi, peningkatan upaya

pencegahan terjadinya penyakit menular dan penyakit tidak menular (PMT) serta perbaikan kesehatan lingkungan

- b. Peningkatan persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih;
 - c. Peningkatan akses pelayanan KB yang merata;
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan pada setiap strata pelayanan;
 - e. Pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk terutama keluarga miskin;
 - f. Peningkatan kualitas, kuantitas dan pendayagunaan tenaga kesehatan;
 - g. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta mendorong pemberdayaan masyarakat;
 - h. Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas atau sarana dan prasarana kesehatan.
 - i. Pemantapan pelayanan RSUD sebagai layanan BLUD
2. Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata
- 1) Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
 - 2) Penanganan ruas jalan Kabupaten melalui peningkatan, rehabilitasi serta pemeliharaan rutin dan berkala.
 - 3) Meningkatkan pelayanan prasarana jalan untuk kelancaran pelayanan angkutan orang, barang dan jasa
 - 4) Peningkatan keselamatan lalu lintas jalan

- 5) Pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan,
 - 6) Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi melalui upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun, rehabilitasi jaringan irigasi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan rutin dan berkala.
 - 7) Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku.
 - 8) Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih dan sarana sanitasi.
 - 9) Pengurangan volume sampah yang masuk ke TPA melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah menggunakan sistem 3R dan pembangunan TPS-T (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu)
 - 10) Penataan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik
 - 11) Pengelolaan SDA yang didukung oleh peningkatan kelembagaan SDA dan lingkungan hidup.
3. Penguatan dan percepatan ekonomi yang handal, terintegrasi antar sektoral serta antar wilayah satu dengan lainnya
- 1) Mendorong berkembangnya ekonomi lokal, yaitu usaha yang memanfaatkan potensi dan sumberdaya lokal serta melibatkan pelaku usaha lokal, melalui kegiatan-kegiatan pelatihan kewirausahaan, difusi teknologi tepat guna dan penyuluhan;

- 2) Peningkatan nilai tambah dan produktivitas melalui pengembangan industri dan perdagangan dalam rangka pengembangan rantai nilai untuk membentuk industri dan perdagangan yang kuat,
- 3) Mengembangkan IKM agar perannya setara dengan industri besar sehingga merupakan fondasi perekonomian yang kokoh dan mewujudkan IKM yang mandiri dan atau mendukung industri besar dalam satu kerangka kerjasama yang sederajat dan saling menguntungkan.
- 4) Mengembangkan UKM agar memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan daya saing
- 5) Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta serta menumbuhkan wirausaha baru melalui inkubator bisnis bagi UMKM
- 6) Meningkatkan kualitas SDM Koperasi, koperasi wanita dan UMKM
- 7) Memperluas akses sumber poermodalan koperasi dan UMKM
- 8) Mendorong investasi baru yang diarahkan pada industri yang berorientasi ekspor.
- 9) Mengembangkan potensi wilayah baik pada daerah pesisir, sekitar hutan, persawahan, pertambakan dan daerah daerah sekitar kawasan industri dengan mengembangkan produk unggulan yang spesifik dan kompetitif serta mempunyai dampak langsung percepatan pertumbuhan ekonomi dan

- penciptaan lapangan pekerjaan, serta mendorong promosi produk unggulan daerah
- 10) Pembangunan ekonomi wilayah lebih efisien dengan kerjasama antar wilayah kecamatan/ desa terutama wilayah yang saling berdekatan, dimana kerjasama tersebut mempertimbangkan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi.
 - 11) Mengoptimalkan kontribusi sektor perdagangan dan industri terhadap PDRB
4. Mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan, peningkatan kualitas gizi, serta tersedianya instrumen jaminan pangan bagi setiap rumah tangga
- 1) Revitalisasi pertanian dan Mengembangkan kawasan agropolitan serta minapolitan maupun agroindustri pertanian
 - 2) Mengoptimalkan dan mengembangkan lahan pertanian sebagai penghasil tanaman pangan. Dan melengkapinya dengan infrastruktur, misalnya saluran irigasi dan bendungan untuk meningkatkan hasil tanaman pangan melalui Pengelolaan Lahan dan Air (PLA);
 - 3) Peningkatan pemberdayaan petani/nelayan dan mengoptimalkan kelembagaan petani
 - 4) Meningkatkan produktivitas, daya saing dan nilai tambah produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
 - 5) Peningkatan distribusi dan ketersediaan pangan
 - 6) Meningkatkan pengamanan dan ketahanan pangan

- 7) Mengoptimalkan keberadaan dan fungsi lumbung pangan masyarakat sebagai bagian dari penyangga pangan
 - 8) Mengoptimalkan sarana dan prasarana distribusi pangan untuk menjangkau seluruh wilayah konsumen
 - 9) Stabilitas harga pangan
 - 10) Percepatan penganekaragaman pangan dan percepatan swasembada pangan dan swasembada berkelanjutan
 - 11) Kegiatan-kegiatan sosialisasi informasi pada makanan bergizi, kesehatan masyarakat, dan penyuluhan pertanian dilakukan dengan melibatkan instansi/dinas terkait.
 - 12) Memanfaatkan iptek dalam mengelola sumberdaya alam agar tercipta konservasi dan kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan
 - 13) Peningkatan nilai tambah daya saing dan ekspor
 - 14) Meningkatkan kontribusi sector pertanian (pertanian, ketahanan pangan, peternakan) perkebunan dan kehutanan serta perikanan terhadap PDRB
 - 15) Mengoptimalkan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) secara terpadu
5. Meningkatkan upaya dan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
- 1) Mengkoordinasikan implementasi program-program penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan ketepatan sasaran
 - 2) Pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan

- 3) Peningkatan produktivitas usaha mikro
 - 4) Memberdayakan kelompok masyarakat kurang beruntung termasuk anak terlantar, fakir miskin, manula/ lansia, penyandang cacat dan masyarakat miskiun rawan bencana
 - 5) Renovasi rumah tidak layak huni
 - 6) Mendorong terciptanya perluasan lapangan pekerjaan di sektor formal maupun informal yang didukung oleh tenaga kerja yang terampil dalam suasana hubungan kerja yang harmonis antar pelaku produksi, adanya perlindungan kesehatan dan keamanan kerja
 - 7) Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
6. Penguatan kelembagaan dan aparatur pemerintah berkualitas melalui peningkatan Reformasi Birokrasi
- 1) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - 2) Mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien , kreatif, inovatif, bertanggung jawab dan profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
 - 3) Meningkatkan kepatuhan aparatur pemerintah pada kebijakan dan peraturan yang ditetapkan agar penyelenggaraan pemerintahan lebih efisien dan efektif;
 - 4) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan serta prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan

- 5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kerja dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
- 6) Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah melalui pengawasan internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat;
- 7) Penetapan Ibukota Kabupaten Pasuruan
- 8) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan
- 9) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang semakin kuat, demokratis, dinamis dan bertanggung jawab;
- 10) Mempertahankan netralitas birokrasi dalam kehidupan politik;
- 11) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi termasuk pengembangan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, pelayanan masyarakat, dan pengembangan potensi daerah;
- 12) Penataan sistem administrasi kependudukan yang mengarah pada peningkatan pelayanan, kualitas data dan informasi kependudukan.
- 13) Meningkatkan pengelolaan arsip daerah
- 14) Meningkatkan minat baca masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai

- 15) Meningkatkan pengelolaan data/statistik untuk mendukung penyusunan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah

Berdasarkan uraian kebijakan SIDA sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diringkas sebagaimana pada tabel berikut:

No	Kebijakan	Uraian Materi Kebijakan
1	Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025	Dalam rangka memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi perekonomian yang berdayasaing global diperlukan adanya dukungan penguatan SISTEM INOVASI, melalui: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengembangan IPTEK yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemanfaatan IPTEK nasional; ➤ Peningkatan kualitas dan kemanfaatan IPTEK nasional digunakan untuk mendukung daya saing secara global.
2	Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah	1) Sistem Inovasi Nasional (SINas) dan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. 2) Dalam implementasi SINas maupun implementasi SIDA diharapkan terdapat integrasi berbagai aktor dan/atau komponen yang saling terkait secara konstruktif antara satu dengan yang lainnya
3	Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2011, tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Provinsi Jawa Timur belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang SIDA. Saat ini SIDA Provinsi Jawa Timur hanya dipayungi dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2011, tentang Kebijakan Strategis

No	Kebijakan	Uraian Materi Kebijakan
	Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2014	Pembangunan Daerah IPTEK (Jakstrada IPTEK) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2014
4	RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 - 2025 dengan arah pembangunan	1) Arah pembangunan Kabupaten Pasuruan pada: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Lima tahun ke dua (2010 - 2015) mengarah pada sasaran demi terwujudnya pembangunan yang lebih merata di seluruh kecamatan dan desa sehingga kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Pasuruan menjadi berkurang terutama yang berkenaan dengan isu wilayah Timur dan wilayah Barat, ➢ Lima tahun ketiga (2015 - 2020) diarahkan pada terwujudnya Daya Saing Untuk Mencapai Kemandirian Dan Kesejahteraan
5	RPJMD Kabupaten Pasuruan 2013-2018	1) VISI “MENUJU KABUPATEN PASURUAN YANG SEJAHTERA DAN MASLAHAT” (Maju, Aman, Sehat lahir-batin, Adil dan bermartabat) 2) Misi <ul style="list-style-type: none"> ➢ Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan berdaya saing melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis sekolah formal dan pondok pesantren. ➢ Misi 4 : Mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui revitalisasi pasar desa dan peningkatan produktifitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan 3) Pada BAB II, sub-bab 2.4. ASPEK

No	Kebijakan	Uraian Materi Kebijakan
		<p>DAYA SAING DAERAH</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Aspek daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.➤ Aspek daya saing daerah terdiri dari Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah, Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur dan Fokus Sumber Daya Manusia.

BAB VI

PERUMUSAN DAN PENETAPAN SISTEM INOVASI DAERAH

Penentuan dan pemilihan produk potensial Kabupaten Pasuruan dalam SIDA, di dasarkan pada dokumen perencanaan Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

1. Arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasuruan 2005 – 2025 adalah:
 - 1) Lima tahun ke dua (2010 – 2015) mengarah pada sasaran demi terwujudnya pembangunan yang lebih merata di seluruh kecamatan dan desa sehingga kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Pasuruan menjadi berkurang terutama yang berkenaan dengan isu wilayah Timur dan wilayah Barat,
 - 2) Lima tahun ketiga (2015–2020) diarahkan pada terwujudnya **Daya Saing untuk Mencapai Kemandirian dan Kesejahteraan**
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan 2013-2018, menetapkan bahwa visi-nya adalah *“Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera dan Maslahat”* (Maju, Aman, Sehat lahir-batin, Adil dan bermartabat). Sesuai dengan misi tersebut yang perlu digarisbawahi adalah pada misi ke-4, dimana pada misi ke-4 tersebut di tetapkan bahwa:
Mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui revitalisasi pasar desa dan peningkatan produktifitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

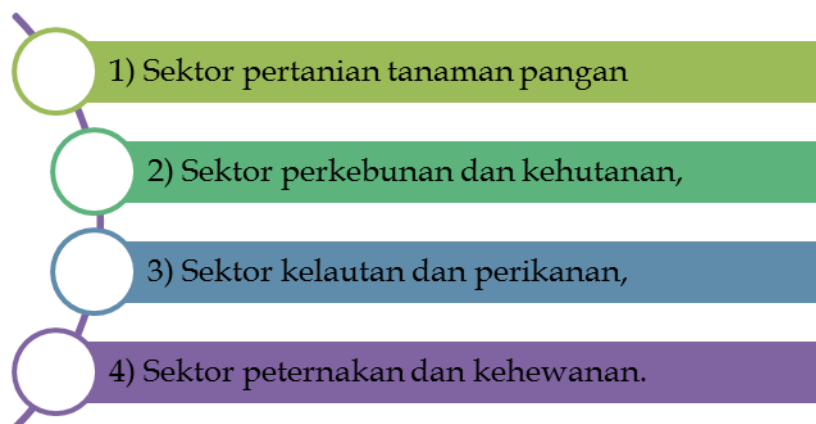
Dengan merujuk pada ketentuan pada RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005 – 2025 sesungguhnya perumusan dan penetapan program SIDA mulai dilaksanakan pada lima tahun ketiga (2015 – 2020) dimana arah pembangunan diarahkan pada *terwujudnya Daya*

Saing untuk Mencapai Kemandirian dan Kesejahteraan. Namun demikian, karena program SIDA di setiap Pemerintah Kabupaten/Kota menurut ketentuan pada Peraturan bersama Menristek dan Mendagri No. 3 tahun 2012 dan No. 32 tahun 2012 harus dilaksanakan pada tahun 2013, maka penyusunan program SIDA Kabupaten Pasuruan harus dilaksanakan.

Sementara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan 2013-2018, pada misi ke-4, ditetapkan bahwa: *Mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui revitalisasi pasar desa dan peningkatan produktifitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.*

3. Hasil diskusi dengan tim teknis dalam Penelitian ini juga sepakat bahwa terdapat 4 sektor potensi Kabupaten Pasuruan yang ditetapkan untuk dimasukkan dalam SIDA.

Dengan merujuk pada kedua dokumen perencanaan Kabupaten Pasuruan dan hasil diskusi dapat dirumuskan empat sektor yang dimaksud adalah:



Selanjutnya, dari keempat sektor tersebut ditetapkan dalam diskusi tersebut ditetapkan pada 4 produk sebagaimana berikut:

Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan dan Kehutanan	Kelautan dan Perikanan	Peternakan dan Kehewanan
<ul style="list-style-type: none"> • Tanaman Pangan • Padi • Jagung • Kedelai • Kacang tanah • Holtikultural • Kentang • Kabis • Durian • Mangga • Apel • Bunga Krisan • Bunga Sedap Malam • Bunga Anggrek 	<ul style="list-style-type: none"> • Tebu • Kapuk Randu • Kunyit • Jahe • Temulawak • Kelapa • Kopi • Kenanga • Cengkeh • Jambu Mete 	<ul style="list-style-type: none"> • Udang • Bandeng • Tongkol • Teri nasi • Cumi-cumi • Mujahir • Tombro • Nila • Gurame dan • Lele 	<ul style="list-style-type: none"> • Sapi perah • Sapi potong • Kambing • Domba dan • Unggas

1. untuk sektor sektor pertanian tanaman pangan dipilih produk tanaman mangga;
2. untuk sektor sektor perkebunan dan kehutanan dipilih produk tanaman kopi;
3. untuk sektor sektor kelautan dan perikanan dipilih dua produk, yakni ikan lele dan ikan bandeng

BAB VII

TANTANGAN DAN PELUANG SISTEM INOVASI DAERAH

Peluang dan tantangan produk dalam SIDA Kabupaten Pasuruan dapat dijabarkan sebagai berikut:

7.1. Tanaman Mangga

1) Tantangan

- a. Produksi Mangga di Kabupaten/Kota di Jawa Timur, yakni:
1) Bondowoso 2) Probolinggo, 3) Situbondo, 4) Magetan, 5) Gresik, 6) Kediri dan produksi Mangga di Jawa Barat;
- b. Produksi mangga ideal ditanam di dataran antara 0 – 400 m dpl. Sementara semua Kabupaten/Kota yang memproduksi mangga di Jawa Timur memiliki ketinggian yang hampir sama.
- c. Daya dukung teknologi pada pola tanam dan produksi mangga, di wilayah lain;
- d. Daya dukung teknologi pengolahan panen dan paska panen, sehingga, produksi mangga di wilayah lain mampu memenuhi pasar modern dan ekspor;
- e. Kemampuan petani dalam memproduksi mangga di wilayah lain, sehingga mampu menjaga kualitas mangga secara konsisten;
- f. Kemampuan petani dalam memproduksi mangga di wilayah lain, sehingga mampu menjaga kuantitas dan kontinuitas produksi mangga dalam upaya menjadi pemasok di setiap segmen pasar;

- g. Harga mangga yang diproduksi di 6 Kabupaten lain dan daerah lain di luar Jawa Timur yang senantiasa bersaing
- h. Anomali Iklim dan bencana alam yang sulit untuk diperkirakan;

2) Peluang

- a. Permintaan produksi mangga terutama mangga masak pohon yang sangat besar terutama pada pasar modern di dalam negeri, maupun import seperti Malaysia, Singapura dan Negara Eropa;
- b. Permintaan produksi mangga pasar tradisional dalam negeri, karena tidak semua Kabupaten/Kota di Indonesia memiliki produksi mangga;
- c. Produksi mangga Klonal 21 dan Grifta hanya baik di tanam di wilayah Kabupaten Pasuruan dibanding dengan wilayah Kabupaten/Kota lain di Indonesia, sehingga kultivar ini dapat dikembangkan;
- d. Pengembangan produk mangga di Kabupaten Pasuruan masih memungkinkan, karena lahan yang tersedia dan belum dikelola terutama lahan kering dan lahan tidur, sehingga tanaman mangga tidak hanya ditanam di lahan masyarakat dan sedikit oleh perusahaan. Karena itu, pengembangan lahan produksi mangga tergantung dari komitmen Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mengembangkannya;
- e. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu Kabupaten yang menjadi sasaran investasi di Jawa Timur, karena itu pemerintah perlu melakukan kerja sama dengan investor untuk mengembangkan produk mangga klonal 21 dan grifta

baik dari sisi pengembangan produk maupun pengembangan pemasaran.

7.2. Tanaman Kopi

1) Tantangan

- a. Produksi tanaman kopi di enam kawasan di Jawa Timur, yang dikenal sebagai penghasil kopi sejak masa kolonial Belanda, seperti: **Ijen-Raung-Argopuro** (Kabupaten Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Situbondo), **Bromo-Tengger-Semeru** (Kabupaten Lumajang, Malang, Probolinggo), **Kelud** (Kabupaten Kediri, Blitar, dan Malang), **Wilis** (Kabupaten Madiun, Kediri, Trenggalek), **Lawu** (Kabupaten Magetan, Ngawi) serta **Kawasan Pantura** (Kabupaten Situbondo dan Probolinggo);
- b. Daya dukung teknologi pada pola tanam dan produksi tanaman kopi yang dilaksanakan di enam wilayah, sehingga produksi senantiasa meningkat;
- c. Daya dukung teknologi pengolahan panen dan paska panen, sehingga produksi kopi mampu memenuhi kebutuhan pasar modern dan pasar ekspor ;
- d. Kemampuan petani kopi dan perusahaan pengelola tanaman kopi di wilayah lain dalam memproduksi kopi dengan tetap menjaga kualitas kopi secara konsisten;
- e. Kemampuan petani kopi dan perusahaan pengelola tanaman kopi dalam memproduksi kopi di wilayah lain sehingga mampu menjaga kuantitas dan kontinuitas jumlah kopi yang diproduksi dan mampu menjadi pemasok di setiap segmen pasar;

- f. Kualitas kopi yang diproduksi di 6 kawasan lain di Jawa Timur dan di luar Jawa Timur yang senantiasa bersaing;
- g. Anomali Iklim dan bencana alam yang sulit untuk diperkirakan.

2) Peluang

- a. Permintaan produksi kopi yang sangat besar terutama pada pasar modern di dalam negeri, maupun pasar import seperti: Amerika, Timur Tengah, dan Eropa;
- b. Permintaan produksi kopi pasar tradisional dalam negeri, karena tidak semua Kabupaten/Kota di Indonesia memiliki produksi kopi;
- c. Pengembangan produk kopi di Kabupaten Pasuruan masih memungkinkan, karena lahan yang tersedia dan belum dikelola terutama lahan di wilayah sekitar Bromo. Karena itu, pengembangan lahan produksi kopi tergantung dari komitmen Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mengembangkannya selain yang diproduksi oleh badan usaha milik negara (BUMN), yakni PT. Perkebunan Nusantara;
- d. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu Kabupaten yang menjadi sasaran investasi di Jawa Timur, karena itu pemerintah perlu melakukan kerja sama dengan investor untuk mengembangkan produk kopi baik dari sisi pengembangan produk maupun pengolahan kopi serta pengembangan pemasaran kopi.

7.3. Ikan Lele

1) Tantangan

- a. Produksi ikan lele di Kabupaten Tulungagung, saat ini mampu memproduksi hingga 9 - 10 ribu ton per tahun;
- b. Pembukaan lahan kolam lele di beberapa wilayah lain sebagai pengembangan budidaya lele;
- c. Daya dukung teknologi sarana produksi untuk budidaya lele di wilayah lain yang telah berkembang, seperti: pembuatan pakan, obat-obatan, sehingga biaya produksi dapat lebih diminimalkan dan produksi dapat meningkat;
- d. Berkembangnya kinerja Balai Benih Ikan (BBI) dalam upaya untuk memproduksi binih ikan lele yang lebih produktif di wilayah lain;
- e. Daya dukung teknologi pengolahan ikan lele paska penen, menjadi beberapa produk olahan ikan lele di wilayah lain, seperti: abon lele, keripik lele, dan nugget lele, stick lele, bakso lele, krupuk lele, sale lele, sosis lele, atau produk lain yang dikembangkan;
- f. Kemampuan dan kemauan petani atau pengusaha lele untuk memproduksi ikan lele di wilayah lain sehingga mampu menjaga kuantitas dan kontinuitas produk sesuai dengan kebutuhan pasar ketika menjadi pemasok di setiap segmen pasar;
- g. Kemampuan dan kemauan petani atau pengusaha lele di wilayah lain untuk memproduksi ikan lele dengan tetap menjaga kualitas produk secara konsisten;
- h. Penentuan harga jual yang memiliki daya saing di wilayah lain;

- i. Anomali Iklim dan bencana alam yang sulit untuk diperkirakan dalam proses budidaya lele.

2) Peluang

- a. Permintaan produksi lele untuk konsumsi di pasar tradisional, yang senantiasa meningkat tiap tahun;
- b. Pengembangan produk ikan lele di Kabupaten Pasuruan masih memungkinkan, karena lahan yang tersedia cukup luas terutama di wilayah pesisir, dan didukung oleh sistem pengairan yang memadai;
- c. Kabupaten Pasuruan merupakan wilayah yang memiliki perusahaan yang banyak, sehingga perlu dilaksanakan kerjasama antar pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan perusahaan dalam membina, membantu pendanaan petani lele, daya dukung teknologi melalui PKBL atau CSR;
- d. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu Kabupaten yang menjadi sasaran investasi di Jawa Timur, karena itu pemerintah perlu melakukan kerja sama dengan perusahaan yang menginvestasikan usahanya di Kabupaten Pasuruan mengelola dan mengembangkan usahanya di bidang pengelolaan produksi lele paska panen menjadi produk olahan yang memiliki daya saing;
- e. Mengoptimalkan kinerja Balai Benih Ikan (BBI) di Kabupaten Pasuruan untuk menemukan binih lele yang lebih produktif untuk dibudidayakan;
- f. Mengoptimalkan kinerja Laboratorium Hama dan Penyakit untuk menemukan obat-obatan yang murah dan dibutuhkan dalam produksi lele, sehingga budi daya lele tidak terganggu dengan penyakit;

- g. Sumberdaya manusia di Kabupaten Pasuruan sangat besar, sehingga dalam pengembangan budidaya lele tidak kesulitan tenaga kerja;
- h. Pengolahan produk lele sangat banyak variasinya, karena itu manakala didukung oleh teknologi dan pengetahuan, maka produksi lele akan dapat diolah menjadi berbagai macam produk olahan, selain memenuhi konsumsi masyarakat secara langsung.

7.4. Ikan Bandeng

1) Tantangan

- a. Produksi budidaya ikan bandeng di wilayah lain di Jawa Timur seperti: Probolinggo, Banyuwangi, Sidoarjo, Gersik, Lamongan yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan bandeng di pasar, termasuk provinsi lain seperti: Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, NAD, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Banten, dan Kalimantan Selatan.
- b. Produk olahan bandeng yang telah dilaksanakan di wilayah lain seperti: bandeng bumbu sapit, bandeng presto, bandeng asap, otak-otak bandeng, bakso bandeng, nugget bandeng, sosis bandeng, abon bandeng, abon duri bandeng dan lainnya yang telah di produk dengan teknologi dan mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun luar negeri;
- c. Dukungan teknologi pada budidaya bandeng di wilayah lain;
- d. Dukungan teknologi pada pengolahan pasca panen bandeng di wilayah lain;

- e. Kemampuan petani dan perusahaan untuk membudiyakan bandeng yang senantiasa setiap tahun meningkat dan tetap menjaga kualitas secara konsisten, kontinuitas secara konsisten;
- f. Dukungan teknologi bagi petani dan perusahaan pembudidaya bandeng di wilayah lain sehingga mampu memasarkan produk bandeng segar dan produk olahan bandeng;
- g. Berkembangnya usaha penyediaan benih (nener) di wilayah lain yang dilakukan secara kontinyu dengan mutu yang baik melalui sistem pembenihan yang intensif pada kolam-kolam khusus, yaitu kolam pematangan induk, pemijahan, peneneran dan kolam pembesaran;
- h. Anomali Iklim dan munculnya banyak penyakit pada budidaya bandeng seperti: *pembusukan sirip, vibriosis, protozoa, dan cacing renik.*

2) Peluang

- a. Permintaan produksi bandeng setiap tahun senantiasa meningkat untuk wilayah lain seperti: Kota Solo, Semarang dan Jakarta;
- b. Permintaan produk olahan bandeng seperti: bandeng bumbu sapit, bandeng presto, bandeng asap, otak-otak bandeng, bakso bandeng, nugget bandeng, sosis bandeng, abon bandeng, abon duri bandeng dan lainnya yang telah di produk dengan teknologi cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun luar negeri;
- c. Pengembangan produk ikan bandeng di Kabupaten Pasuruan masih memungkinkan, karena lahan yang tersedia

- cukup luas terutama di wilayah pesisir, dan didukung oleh sistem pengairan yang memadai;
- d. Pengembangan usaha bandeng di Kabupaten Pasuruan tidak hanya budidaya pembesaran, tetapi bisa dikembangkan usaha pembibitan;
 - e. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu Kabupaten yang menjadi sasaran investasi di Jawa Timur, karena itu Pemerintah Kabupaten Pasuruan bisa melakukan kerjasama untuk menyediakan pakan, obat-obatan, yang murah dan pengolahan produk ikan bandeng menjadi produk olahan yang lebih bervariasi;
 - f. Sumberdaya manusia di Kabupaten Pasuruan sangat besar, sehingga dalam pengembangan budidaya bandeng tidak kesulitan tenaga kerja;

BAB VIII

KELEMBAGAAN SISTEM INOVASI DAERAH

Dalam upaya untuk membangun SIDA di Kabupaten Pasuruan, Bupati Kabupaten Pasuruan perlu menetapkan penataan kelembagaan SIDA Kabupaten Pasuruan. Penataan kelembagaan SIDA Kabupaten Pasuruan terdiri atas:

1. Pembentukan Tim Koordinasi SIDA Kabupaten Pasuruan;
2. Pembentukan peraturan perundang-undangan SIDA Kabupaten Pasuruan; dan
3. Pembentukan norma/etika/budaya SIDA Kabupaten Pasuruan.

1. Pembentukan Tim Koordinasi SIDA Kabupaten Pasuruan

Tim Koordinasi SIDA Kabupaten Pasuruan merupakan sebuah Lembaga SIDA Kabupaten Pasuruan yang wajib dibentuk oleh Bupati Kabupaten Pasuruan. Untuk melengkapi kerja dari tim koordinasi SIDA Kabupaten Pasuruan, perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana perkantoran, peralatan kerja.

Draft Tim Koordinasi SIDA Kabupaten Pasuruan dengan merujuk pada Peraturan bersama Menristek dan Mendagri No. 3 tahun 2012 dan No. 32 tahun 2012 sebagaimana berikut:

1	Pengarah		Bupati Kabupaten Pasuruan					
2	Ketua		Sekretaris Kabupaten Pasuruan					
3	Sekretaris		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					
4	Anggota	1	Institusi Pemerintah Kabupaten Pasuruan	1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
				2) Dinas Koperasi dan UKM				
				3) Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan				
				4) Dinas Peternakan dan Kehewanan				
				5) Dinas Kelautan dan Perikanan				
				6) Dinas Perkebunan dan Kehutanan				
				7) Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
					2) Lembaga Kelitbangan			
					3) Lembaga Penunjang Inovasi			
					4) Lembaga Pendidikan			
					5) Dunia Usaha			
					6	Organisasi Masyarakat		LSM yang pada bidang/ sektor produk unggulan

Tugas Tim Koordinasi SIDA Kabupaten Pasuruan adalah:

- 1) Menyusun *Roadmap* penguatan SIDA Kabupaten Pasuruan,
- 2) Melakukan integrasi, sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi program SIDA Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan Kabupaten Pasuruan lainnya seperti: i) RPJPD Kabupaten Pasuruan; ii) RPJMD Kabupaten Pasuruan; iii) RKPD Kabupaten Pasuruan; dan RENSTRA SKPD yang mengelola potensi daerah terkait dengan program SIDA;
- 3) Memetakan, merumuskan, menganalisis, dan menetapkan potensi daerah yang menjadi potensi SIDA ;
- 4) Membangun kelembagaan tiap cluster SIDA Kabupaten Pasuruan;
- 5) Membangun jaringan SIDA Kabupaten Pasuruan, meliputi:
 - a. Kerjasama dengan lembaga pelaku Inovasi/Iptek baik berskala Lokal maupun Nasional, seperti Balai Penelitian Tanaman, Balai Penelitian Peternakan, Balai Besar Pasca Panen ;
 - b. Kerjasama dengan instansi penyedia lahan, seperti PHBM Perhutani atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH);
 - c. Kerjasama dengan instansi Swasta yang memproduksi produk unggulan di Kabupaten Pasuruan, Seperti PT HM Sampoerna;
- 6) Pengembangan SIDA, melalui pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di Kabupaten Pasuruan;
- 7) Mengakomodasi seluruh program dan kegiatan SIDA Kabupaten Pasuruan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur, dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan serta pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

- 8) Melakukan monitoring dan evaluasi program SIDA secara keseluruhan dan masing-masing program SIDA tiap cluster SIDA; dan
- 9) Melaporkan hasil pelaksanaan program SIDA secara keseluruhan dan masing-masing program SIDA tiap cluster SIDA secara periodik kepada Bupati.

2. Pembentukan peraturan perundang-undangan SIDA Kabupaten Pasuruan, yang terdiri dari:

- 1) Penyusunan kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Pasuruan, yang memayungi seluruh cluster SIDA Kabupaten Pasuruan;
- 2) Penyusunan kebijakan tiap cluster penguatan SIDA Kabupaten Pasuruan sesuai dengan jumlah cluster yang dibentuk dengan memperhatikan dan mensikorkan dokumen kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Pasuruan;

3. Penataan terhadap norma/etika/budaya dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme nilai-nilai sosial bagi penguatan SIDA Kabupaten Pasuruan.

BAB IX

PENUTUP

Rumusan kesimpulan dan rekomendasi dari pembahasan tentang SIDA Kabupaten Pasuruan adalah:

9.1 Kesimpulan

1. Salah satu tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah (UU 32/2004, Pasal 2, Ayat 3). Sehubungan dengan itu, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban untuk memajukan dan mengembangkan daya saing daerah (Pasal 27, Ayat 1, butir g). Daya saing daerah, bagi setiap pemerintah daerah, tak terkecuali Pemerintah Kabupaten Pasuruan wajib dirumuskannya ke dalam dokumen Sistem Inovasi Daerah (SIDa).
2. SIDA Kabupaten Pasuruan merupakan sebuah dokumen perencanaan Kabupaten Pasuruan yang bermateri tentang rumusan potensi daerah yang unggul dan bisa dikembangkan, potensi daerah yang memiliki daya saing, potensi daerah yang dikelola dengan inovasi yang ber-basis ilmu dan teknologi. Keseluruhan materi tersebut menjadi satu sistem untuk menumbuh-kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbang, lembaga

pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

3. SIDA Kabupaten Pasuruan merupakan dokumen perencanaan yang bersinergi dan terkait dengan dokumen perencanaan lain di Kabupaten Pasuruan (RPJPD, RPJPM, RKPD dan Renstra SKPD) serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIDA Provinsi Jawa Timur dan Sistem Inovasi Nasional (SINAS).
4. Arah pembangunan Kabupaten Pasuruan dalam upaya untuk mewujudkan *"Daya Saing untuk Mencapai Kemandirian dan Kesejahteraan"* menurut RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 - 2025 baru direncanakan pada 5 (*lima*) tahun ketiga (2015 - 2020). Sementara untuk lima tahun ke dua (2010 - 2015) mengarah pada sasaran demi terwujudnya pembangunan yang lebih merata di seluruh kecamatan dan desa sehingga kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Pasuruan menjadi berkurang terutama yang berkenaan dengan isu wilayah Timur dan wilayah Barat. Pada sisi lain, dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan 2013-2018 telah tertuang pada:
 - Misi ke-2: Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan berdaya saing melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis sekolah formal dan pondok pesantren.
 - Misi ke-4: Mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui revitalisasi pasar desa dan peningkatan produktifitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

Memperhatikan misi ke-2 dan ke-4 tersebut serta memperhatikan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, maka disusun tentang SIDA Kabupaten Pasuruan;

5. Dengan memperhatikan misi ke-4 dan hasil analisis potensi daerah di Kabupaten Pasuruan serta hasil diskusi dengan tim teknis, maka dari 6 sektor potensi daerah di pilih 3 sektor potensial yang dikembangkan dalam SIDA. Dari ke-3 sektor tersebut adalah 1) sektor sektor pertanian tanaman pangan dipilih produk tanaman mangga; 2) sektor perkebunan dan kehutanan dipilih produk tanaman kopi; dan 3) sektor kelautan dan perikanan dipilih dua produk, yakni ikan lele dan ikan bandeng;
6. Dalam upaya untuk merealisasikan daya saing dan inovasi teknologi ke-4 produk yang dipilih, perlu memperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi (lihat bab-7) dan dukungan kelembagaan baik yang berskala Kabupaten maupun skala cluster (lihat bab-8).
7. Penelitian ini merupakan langkah awal dari penyusunan SIDA Kabupaten Pasuruan. Karena itu hasil Penelitian ini hanya memberikan informasi Penelitian tentang potensi daerah, kelembagaan, Penelitian kebijakan SIDA yang bisa dimasukkan dalam penyusunan roadmap SIDA Kabupaten Pasuruan. Dalam rangka untuk menyempurnakan dokumen SIDA Kabupaten pasuruan perlu disusun oleh Tim Koordinasi SIDA.

9.2 Rekomendasi

Dalam rangka untuk membentuk SIDA di Kabupaten Pasuruan direkomendasikan:

1. Pembentukan kelembagaan SIDA Kabupaten Pasuruan atau disebut dengan Tim Koordinasi SIDA dan disertai dengan pembagian kerja tiap anggota Tim Koordinasi SIDA.
2. Tugas yang urgent dari tim koordinasi SIDA adalah:
 - 1) Merumuskan ulang potensi SIDA saat ini atau yang telah dianalisis dalam Penelitian ini;
 - 2) Menyusun Naskah Akademik tentang:
 - a. draf legal kelembagaan SIDA, dan
 - b. draf legal kelembagaan SIDA tiap cluster;
 - 3) Penyusunan cluster SIDA berdasarkan potensi unggulan yang dipilih dan ditetapkan melalui *feasibility study*.
 - 4) Penyusunan rencana aksi SIDA (arah kebijakan, program dan kegiatan untuk tiap – tiap cluster SIDA)
3. Untuk mengotimalkan kinerja SIDA pada tiap-tiap cluster, perlu dilaksanakan Penelitian tentang “Daya Dukung Teknologi dan Kewirausahaan” yang menjadi kebutuhan masing-masing cluster SIDA.
4. Keberhasilan SIDA pada masing-masing cluster, tidak lepas dari kompetensi sumberdaya manusia. Sehubungan dengan itu dibutuhkan sebuah pelatihan tentang produksi, keuangan dan pemasaran menjadi hal yang penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansoff, Igor and McDonnell, Edwar, **Implanting Strategic Management**, Second Edition, Prentice Hall, London, 1990.
- Bryant, Coralie and White Louis G., **Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang**, Alih Bahasa oleh Simatupang, Rusyanto L., LP3ES, Jakarta, 1989.
- Bryson, John M., **Strategic Planning for Public and Non-Profit Organizations**, First Edition, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, Oxford, 1991.
- Certo, Samuel C., and Peter J. Paul, **Strategic Management: Concepts and Applications**, Second Edition, Mc Graw Hill, Inc., Singapore, 1991.
- Chelimsky, Eleanor, **Program Evaluation: Patterns and Directions**, Second Edition, The American Society for Public Administration, Washington, 1989.
- Cooper, Donald R., and Emory, C. William, **Metode Penelitian Bisnis**, Jilid 1 dan 2, Edisi Kelima, Alih Bahasa oleh Ir. Widyono Soetjipto, M.A., dan Ir. Uka Wikarya, Erlangga, Jakarta, 1998
- Cravens, David W, **Strategic Marketing**, Third Edition, Richard D. Irwin, Inc., Boston, 1991.
- Davenport, Thomas H., and Prusak, Laurence, **Working Knowledge**, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 2000.
- Goldman, Steven L., Nagel, Roger N., and Preiss, Kenneth, **Agile Competitors and Virtual Organizations: Strategies for Enriching the Customer**, Van Nostrand Reinhold, New York, 1995.
- Grant, Robert M., **Contemporary Strategy Analysis**, Third Edition, Blachwell Publishers Inc., Massachusett, 1999
- Hamel, Gary, and Prahalad, C.K., **Competing for the Future**, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 1994.
- Kassarjian, Harold H., and Robertson Thomas S., **Perspectives in Consumer Behavior**, Forth Edition, Prentice-Hall, New Jersey, 1991.

- Kilmann, Ralph H., Kilmann, Ines, and Associates, **Making Organization Competitive**, First Edition, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 1991.
- Kinnear Thomas C., and Taylor, James R., **Marketing Research: An Applied Approach**, Fifth Edition, Mc Graw-Hill, Sydney, 1996.
- Lewis, Joedan D., **The Connected Corporation: How Leading Companies Win Through Customer-Supplier Alliances**, The Free Press, New York, 1995.
- Malhotra, Naresh K., **Marketing Research: An Applied Orientation**, Prentice-Hall, Jew Jersey, 1993 & 1999.
- Mintzberg, Henry, Ahlstrand, Bruce, and Lampel, Joseph, **Strategy Savari: A Guided Tour Through The Wilds of Strategic Management**, The Free Press, New York, 1998.
- Nonaka, Ikojiro, and Takeuchi, Hirotaka, **The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation**, Oxford University Press, New York, 1995.
- Parasuraman, A., **Marketing Research**, Second Edition, Addison Wesley, New York, 1991.
- Pearce II, John A., and Robinson, JR., Richard B., **Strategic Management: Formulation, Implementation, and Control**, Fourth Edition, The Free Press, New York, 1991, & 2000.
- Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2012 dan Nomor: 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
- Porter, Michael E., **Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors**, The Free Press, New York, 1980.
- Taufik, Tatang A. 2005. **Pengembangan Sistem Inovasi Daerah: Perspektif Kebijakan**. Jakarta: Pusat PengPenelitian Kebijakan Teknologi Pengembangan Unggulan Daerah dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Deputi Bidang PengPenelitian Kebijakan Teknologi, Badan PengPenelitian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Tull, Donald S., and Hawkins Dell I., **Marketing Research: Measurement and Method**, Sixth Edition, Macmillan, New York, 1993.

Wheelen, Thomas L., and Hunger, J. David, **Strategic Management and Business Policy**, Fifth Edition, Addison-Wesley Publishing Company, Singapore, 1995.

Zikmund, William G., **Exploring Marketing Research**, Sixth Edition, The Dryden Press, Orlando, 1997.